

**OLIGARKI POLITIK: PERTEMUAN KEPENTINGAN BISNIS  
DAN KEPENTINGAN POLITIK DI NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DIANA FAUDHIAH**  
**NIM. 150801001**

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

**PRODI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2019**

**OLIGARKI POLITIK: PERTEMUAN KEPENTINGAN BISNIS DAN  
KEPENTINGAN POLITIK DI NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1) Pada Prodi Ilmu Politik

Oleh:

**DIANA FAUDHIAH**

150801001

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Eka Srimulyani, P.Hd  
NIP : 197702191998032001

Pembimbing II



Fajran Zain, MA  
NIDN : 2003127303

**OLIGARKI POLITIK: PERTEMUAN KEPENTINGAN BISNIS DAN  
KEPENTINGAN POLITIK DI NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 02 Agustus 2019

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, P.Hd  
NIP : 197702191998032001

Sekretaris,

Fajran Zain, MA  
NIDN : 2003127303

Penguji I

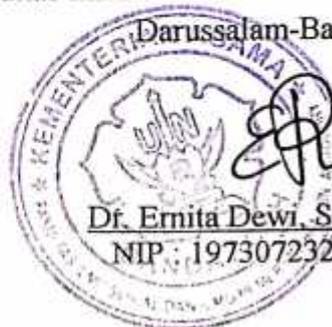
Muazzinah, B. Sc., MPA  
NIDN : 2025118401

Penguji II

Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.Si  
NIDN : 2019119001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M. Hum  
NIP : 197307232000032000

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Diana Faudhiah  
NIM : 150801001  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

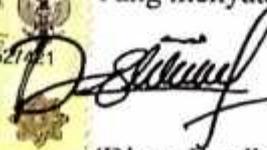
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2019



Yang menyatakan



(Diana Faudhiah)

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang oligarki politik yang merujuk pada politik pertahanan kekayaan, dimana pebisnis terlibat langsung dalam politik praktis di Nagan Raya. Mereka menduduki jabatan politik sebagai bupati dan wakil bupati, serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, tepatnya pebisnis menjadi penguasa di Nagan Raya. Hal itu menimbulkan kepentingan bisnis dan politik. Dimana politik dapat dijadikan alat dalam proses perluasan bisnis. Masyarakat memandang bahwa pebisnis yang masuk ke politik harus memiliki kapasitas, namun di Nagan Raya belum terjadinya perubahan. Oleh karena itu timbul pertanyaan tentang motif pebisnis terjun ke politik, dan apakah jabatan politik terbukti mampu atau tidak dalam memperbesar bisnis. Kemudian bagaimana pandangan masyarakat tentang pebisnis yang masuk ke ranah politik di Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal pokok dari metode ini adalah wawancara mendalam dengan informan yang diteliti dan juga dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu motif pebisnis adalah mengekspansi bisnis mereka. Kemudian ditemukan bahwa jabatan politik terbukti mampu memperbesar bisnis dengan memudahkan jalan dalam membangun industri dan perusahaan, penambahan Hak Guna Usaha (HGU), dan monopoli harga barang (sawit). Masyarakat Nagan Raya tidak mempersalahkan tentang pebisnis yang menggunakan jabatan politik untuk memperluas bisnis, selama mereka mampu membangun daerah. Namun kenyataannya, masyarakat melihat bahwa pebisnis yang memimpin Nagan Raya sekarang ini belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menjalankan roda pemerintahan disebabkan oleh Nagan Raya yang tidak mengalami perubahan dan masih jalan ditempat.

Kata kunci: *Oligarki, politik.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kemampuan dan intelektual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Oligarki Politik: Pertemuan Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Politik di Nagan Raya”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang bersifat membangun, agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan khususnya pembimbing, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Eka Srimulyani, P.hD selaku pembimbing I dan Dr. Fajran Zain, MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing,

mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Warul Walidin, AK.MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum. Selaku Dekan Fisip UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
4. Dr. Muhammad, M.Ed. Selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Politik, Eka Januar M.Soc.Sc. Selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Politik, serta seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibunda Nurmala Wati dan Ayahanda Tgk. M. Sabil Daud atas segala jasa-jasanya, kasih sayang dan do'a yang tulus kepada penulis, serta membiayai pendidikan demi kesuksesan penulis. Kemudian juga kepada abang Sirajuddin yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
6. Pemerintah dan masyarakat Nagan Raya serta narasumber lainnya.
7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik dan sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan memotivasi penulis.

Terimakasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Banda Aceh, 22 Juli 2019

Penulis,

Diana Faudhiah

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara Dengan Pebisnis yang Berkarir Dalam Politik.

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat Nagan Raya.

Lampiran 3: Hasil Rapat Penetapan dan Pemantauan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Wilayah Barat Untuk Periode Mei dan Juli 2019.

Lampiran 4: Tanggapan Masyarakat Terhadap Pebisnis yang Terjun Ke Politik.

Lampiran 5: Tanggapan Masyarakat Tentang Nagan Raya yang Dipimpin Oleh Pebisnis.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penulisan .....	6
1.4. Manfaat Penulisan .....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Politik.....	11
2.3. Oligarki Politik.....	12
2.4. Kekuasaan .....	17
2.4.1. Pengertian Kekuasaan.....	17
2.4.2. Dimensi Kekuasaan .....	21
2.4.3. Sumber Kekuasaan .....	22
2.5. Bisnis.....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	27
3.1. Pendekatan Penelitian.....	27

3.2. Sumber Data .....	27
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.4. Objek Penelitian .....	29
3.4.1. Lokasi Penelitian.....	29
3.4.2. Subjek Penelitian .....	29
3.5. Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Nagan Raya.....	33
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Nagan Raya .....	33
4.1.2. Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.....	35
4.2. Alasan dan Motif Pebisnis Terjun ke Dunia Politik.....	37
4.3. Jabatan Politik Dalam Memperbesar Bisnis .....	42
4.4. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pebisnis yang Terjun Ke Jalur Politik Di Nagan Raya .....	48
4.4.1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pebisnis yang Terjun Ke Politik....	48
4.4.2. Tanggapan Masyarakat tentang Nagan Raya yang Dipimpin oleh Pebisnis .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fenomena masuknya pebisnis ke dunia politik merupakan salah satu tema penting dan masih diperdebatkan dalam perpolitikan hingga sekarang ini. Banyak pihak beranggapan bahwa pebisnis yang terjun menjadi politikus bertujuan untuk mengekspansi bisnis mereka melalui kekuasaan yang didapatkannya, sehingga mereka bisa menetapkan kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Dalam merumuskan kebijakan, diperlukan politik didalamnya. Kartini Kartono menyatakan bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Jadi politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan agar mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan.

Sekarang ini, begitu banyak pebisnis yang turut mewarnai dunia politik. Mereka tidak lagi hanya berprofesi sebagai pebisnis saja, melainkan juga sebagai politisi. Contohnya pemilik Bakrie Group yang juga merupakan petinggi Partai Golkar yaitu Aburizal Bakrie, Suya Paloh (pemilik Metro TV) bergabung dengan Nasdem, Sandiaga Uno (Saratoga Investama Sedaya) yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan pada pilihan presiden (pilpres) 2019 mencalonkan diri menjadi wakil presiden.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 64.

Ketika pebisnis yang masuk ke politik dengan tujuan mempertahankan atau mengembangkan bisnisnya, maka fenomena tersebut diklaim sebagai bentuk oligarki politik. Hal itu senada dengan pandangan Jeffrey A. Winters, seorang Profesor di Northwestern University yang mengkonstruksi ulang pemahaman oligarki. Menurutnya oligarki tidak hanya sebatas sekelompok elit yang berkuasa atau minoritas yang menguasai mayoritas, namun oligarki merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Oligark).<sup>2</sup> Karenanya, oligarki politik mengarah kepada pemilik modal yang masuk ke dalam pusaran politik dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya.

Di Indonesia, banyak pebisnis mulai memasuki kancah politik semenjak era reformasi. Mereka menduduki kursi eksekutif maupun legislatif, bahkan pebisnis bernaung di bawah partai politik dan memiliki kesempatan serta ruang yang besar untuk mendirikan partai selaku pemilik modal. Dengan demikian, pebisnis mendapat akses kekuasaan sehingga terakomodasinya kepentingan dalam regulasi yang diputuskan di lembaga legislatif. Fenomena pebisnis yang berkarir dalam politik juga terjadi di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Nagan Raya.

Nagan Raya adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten induk yaitu Aceh Barat. Sejak berdirinya Nagan Raya, H. T. Zulkarnaini atau biasanya disapa Ampon Bang telah memegang kekuasaan dari tahun 2002-2017.<sup>3</sup> Selama waktu itu, hanya satu keluarga yang berhasil menguasai Nagan Raya. Namun pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang lalu, roda kekuasaan telah berputar, yang

---

<sup>2</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarkhi Terj.*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 10.

<sup>3</sup> *Nagan Raya dalam Angka 2017*, dalam <https://naganrayakab.bps.go.id/>, Diakses 25 Maret 2019

berhasil menduduki singgasana adalah pasangan Jamin Idham dan Chalidin Oesman atau biasa disebut Jadin. Keduanya adalah seorang pebisnis sukses di bidangnya.

Jamin idham merupakan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Ujoeng Neubok Dalam, meskipun sekarang pengelolaannya telah diserahkan ke anaknya Jamaluddin Idham sebagai Direktur Utama. Sedangkan Chalidin Oesman Ia adalah Komisaris Utama dari PT. Lion Inti Nusantara. Mereka bahkan mampu mengalahkan kandidat yang didukung oleh petahana. Pasangan ini juga merupakan calon bupati dan wakil bupati terkaya di Aceh. Jamin Idham melaporkan kekayaannya sebanyak 80 miliar lebih,<sup>4</sup> sedangkan Chalidin Oesman mencapai 35 miliar lebih.<sup>5</sup> Sebagai seorang pebisnis, fokus utama mereka adalah mendongkrak perekonomian dan menciptakan masyarakat yang produktif untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi. Ini pertama kalinya Nagan Raya dipimpin oleh orang yang berbeda dan mereka adalah pasangan pengusaha (pebisnis).

Fenomena kemenangan pasangan ini merupakan hal baru dan menarik di Nagan Raya. Apalagi merekalah yang berhasil melumpuhkan kekuasaan yang dipegang oleh orang yang sama selama hampir dua dekade. Tentunya kondisi ini membawa perubahan baru bagi struktur pemerintahan maupun masyarakat Nagan

---

<sup>4</sup> Aceh Terkini, *Jamin Idham, Calon Kepala Daerah Terkaya di Aceh, Baca Daftar Lengkapnya*, 16 November 2016, dalam <https://www.acehterkini.com/2016/11/jamin-idham-calon-kepala-daerah-terkaya-baca-daftar-lengkapnya.html>, Diakses 26 Juni 2019.

<sup>5</sup> Media Aceh, *Ini Calon Wakil Bupati Terkaya di Aceh*, 8 Oktober 2016, dalam <http://mediaaceh.co/2016/10/ini-calon-wakil-bupati-terkaya-di-aceh/>, Diakses 26 Juni 2019.

Raya. Sekarang ini, pebisnis lain juga turut berkecimpung ke jalur politik di Nagan Raya seperti Puji Hartini dan Tgk. Samsuar.

Berdasarkan penelitian awal, sejauh ini ada beberapa pebisnis yang terlibat langsung dalam pentas politik Nagan raya. Ini dapat kita lihat dari pebisnis asal Jakarta, Puji Hartini (Direktur Mutiara Tiga Berlian) yang mencalonkan diri menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya melalui Partai Sira. Kemudian Tgk Samsuar alias Wan Malaya, pebisnis sukses Kuala Lumpur terjun ke Partai Aceh (PA) dan menjabat sebagai ketua PA, meskipun tidak memiliki jabatan politik, akan tetapi tetap memiliki keuntungan apabila partainya atau orang yang diusungkan meraih kemenangan. Tentunya pebisnis-pebisnis tersebut memiliki peran besar dalam konteks kebijakan politik di Nagan Raya.

Peneliti menemukan bahwa salah satu tujuan pebisnis masuk ke ranah politik di Nagan Raya adalah untuk mengekspansi bisnis mereka seperti pembangunan industri atau perusahaan. Dimana terjadinya kepentingan bisnis dan kepentingan politik disana. Memperluas bisnis tentu akan lebih mudah bila memiliki kekuasaan sehingga bisa merumuskan kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Namun ada juga pebisnis yang meski mendapat jabatan politik tidak akan berpengaruh terhadap bisnis yang dia kembangkan, dikarenakan bisnis mereka berada di luar daerah, sehingga kebijakan politik daerah Nagan Raya tidak berpengaruh terhadap bisnis yang berada diluar daerah tersebut, kecuali mendirikan cabang atau perusahaan lain di Nagan Raya.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan bisnis mereka, maka dibutuhkan politik didalamnya. Politik dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan bisnis, salah satunya dengan mendapatkan jabatan politik. Pebisnis yang memiliki jabatan politik, selain memiliki kekayaan juga memiliki kekuasaan. Bagi masyarakat Nagan Raya, masuknya pebisnis ke kancah politik merupakan hal yang bagus dalam upaya mendongkrak perekonomian daerah. Namun demikian, sekarang ini masyarakat Nagan Raya memandang bahwa pebisnis yang terjun ke politik belum tentu mampu memajukan daerah seperti memajukan bisnisnya. Ini dilihat dari Nagan Raya yang belum mengalami perubahan yang signifikan dalam perekonomian. Banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari era perubahan tersebut. Kondisi seperti ini tentu tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat sekilas saja. Perlu ada kajian dan penelitian yang mendalam untuk mengetahui motif pebisnis dan pandangan masyarakat Nagan Raya terhadap hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Oligarki Politik: Pertemuan Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Politik di Nagan Raya”.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apa motif pebisnis terjun ke politik?
2. Apakah jabatan politik terbukti memperbesar kerajaan bisnis pribadi?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap masuknya pebisnis ke jalur politik di Nagan Raya?

### 1.3. Tujuan Penulisan

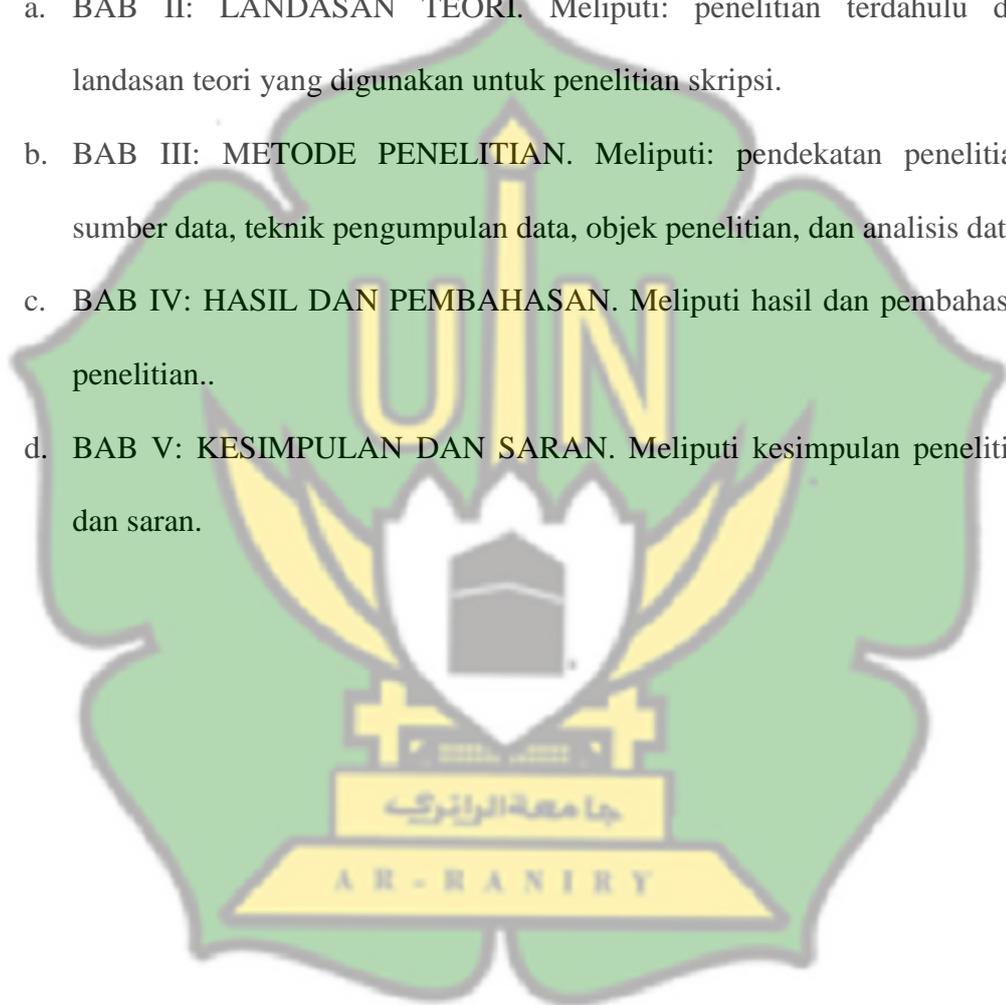
1. Untuk mengetahui motif pebisnis berkarir dalam politik di Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui apakah jabatan politik terbukti memperbesar kerajaan bisnis pribadi.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap masuknya pebisnis ke jalur politik di Nagan Raya.

### 1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi dalam menyumbangkan pemikiran untuk penambahan ilmu pengetahuan dalam konteks ilmiah.
  - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan oligarki politik dengan pembahasan kepentingan bisnis dan politik.
  - c. Menjadi tambahan refensi dalam memperkaya teori terutama bagi civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah wawasan tentang hal yang berkaitan dengan oligarki politik khususnya bagi penulis sendiri.
  - b. Memberikan pengetahuan mengenai politik praktis di Nagan Raya.
  - c. Mengetahui dampak dari masuknya pebisnis ke jalur politik di Nagan Raya.

### 1.5. Sistematika Penulisan

- a. BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- a. BAB II: LANDASAN TEORI. Meliputi: penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan untuk penelitian skripsi.
- b. BAB III: METODE PENELITIAN. Meliputi: pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan analisis data.
- c. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Meliputi hasil dan pembahasan penelitian..
- d. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN. Meliputi kesimpulan penelitian dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Herning Suryo dalam jurnalnya berjudul “*Konspirasi Bisnis (Pengusaha) dalam Politik Praktis*” membahas tentang bagaimana konspirasi bisnis yang terjadi dalam politik praktis. Ia menemukan bahwa dalam politik praktis terjadinya rumus balas jasa antara penguasa dan pengusaha, dimana setelah pengusaha berhasil memenangkan kandidat yang didukungnya, maka Ia akan menuntut untuk membalas jasa dengan cara mendapat proyek dan pengamanan terhadap asetnya. Penulis menyimpulkan bahwa konspirasi ini terjadi dikarenakan kepentingan dalam menjalankan bisnisnya.<sup>6</sup>

Jurnal diatas memiliki perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Dalam jurnal tersebut membahas tentang rumus balas jasa antara pebisnis dan penguasa. Sedangkan dalam penelitian penulis, akan membahas tentang pebisnis yang masuk ke dunia politik, yang intinya bahwa pebisnis sendiri adalah penguasa.

Selanjutnya Ray Daniel M dalam tulisannya berjudul “*Bisnis dan Politik Studi Kepentingan : Pengusaha Lokal dalam Pemenangan Calon Bupati Johnny Sitohang Dairi 2014-2019*” membahas tentang peranan pengusaha lokal dalam memenangkan kandidat tertentu dalam pilkada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan pendekatan yang digunakan oleh pengusaha di Kabupaten Dairi dalam usaha untuk mengarahkan pilihan masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Dairi untuk masa jabatan 2014 – 2019. Penulis

---

<sup>6</sup> Herning Suryo, *Konspirasi Bisnis (Pengusaha) Dalam Politik Praktis*, (vol. 1, No. 26, 2014).

menganalisis dominasi kekuatan pengusaha dalam kondisi sebagian besar masyarakat pemilih yang relative belum memahami betul “nilai penting” dari Pilkada. Ia menemukan bahwa kekuatan ekonomi mendominasi dalam sistem penentuan kepala daerah di Dairi, dimana pengusaha mampu mengontrol dan mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan kepentingan pengusaha tersebut. Dengan mendapatkan kekuasaan politik maka mempermudah dalam mengarahkan setiap kebijakan untuk kepentingan pengusaha.<sup>7</sup>

Perbedaannya, tulisan diatas meneliti tentang keterlibatan pebisnis dalam memenangkan suatu kandidat dalam pilkada. Sedangkan penulis akan meneliti tentang pebisnis yang berkarir dalam politik.

Dodi Suprihanto dalam skripsinya berjudul “*Pengusaha dan Politik: Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik Di Sumatera Barat 1999-2009*” membahas tentang keberadaan pengusaha dalam dunia politik praktis di Sumatera Barat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah keterlibatan pengusaha dalam dunia politik sejak masa reformasi dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, mengapa pengusaha bisa menjadi ketua partai dan apakah mereka memiliki kapasitas sebagai pemimpin, atau hanya karena kekayaan mereka saja. Penulis menemukan bahwa pengusaha yang terjun ke kancah politik

---

<sup>7</sup> Ray Daniel M, *Bisnis dan Politik Studi Kepentingan : Pengusaha Lokal dalam Pemenangan Calon Bupati Johnny Sitohang Dairi 2014-2019*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2016).

di Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, yaitu untuk menyelamatkan dan mengembangkan kepentingan bisnis mereka.<sup>8</sup>

Skripsi diatas memiliki persamaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu tentang motif pebisnis masuk ke dunia politik. Perbedaannya, dalam penelitian ini ada perkembangan dari penelitian sebelumnya. Penulis akan meneliti apakah jabatan politik terbukti mampu mempertahankan dan mengembangkan bisnis atau tidak, kemudian juga akan melihat lebih dalam bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pebisnis yang masuk ke kancah politik

Selanjutnya dalam tulisan James R. Situmorang berjudul "*Beberapa Keterkaitan antara Politik dan Bisnis*". Pada awalnya ia melihat Politik dan bisnis secara terpisah. Dimana bisnis utamanya berfokus pada strategi dan kebijakan untuk meningkatkan operasi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sedangkan politik bermain di arena yang berbeda, menggali penciptaan kebijakan publik untuk kemajuan konstituen dan negara. Namun, setelah penulis melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana politik dan bisnis benar-benar bekerja, hubungan antara keduanya menjadi jelas. Keduanya saling memengaruhi. Penulis menemukan bahwa bagi pebisnis, stabilitas politik sangat penting, hal ini mengingat investasi yang ditanamkan dalam jumlah yang (sangat) besar. Stabilitas politik dapat menjamin stabilitas ekonomi, demikian pula sebaliknya stabilitas ekonomi akan meningkatkan stabilitas politik, karena rakyat yang semakin makmur akan berkurang keinginannya untuk berbuat hal-hal yang anarkis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dodi Suprihanto, *Pengusaha dan Politik : Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik Di Sumatera Barat 1999-2009*, (Padang: Universitas Andalas, 2011).

<sup>9</sup> JR Situmorang, *Beberapa Keterkaitan antara Politik dan Bisnis*, (vol. 5, No. 2, 2009).

Tulisan tersebut membahas tentang keterkaitan politik dan bisnis. Tentu berbeda dengan penelitian penulis, dimana akan membahas tentang pebisnis yang menjadi politisi.

Selain perbedaan-perbedaan tersebut, perbedaan lainnya adalah bahwa penelitian penulis memiliki tempat atau lokasi, waktu dan aktor yang berbeda dengan penelitian lainnya.

## 2.2. Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).<sup>10</sup> Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>11</sup>

Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>12</sup> Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan

<sup>10</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori politik*, (Malang: Setara press, 2009), hlm. 2

<sup>11</sup> Gabriel A. Almond dalam Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), hlm. 3

<sup>12</sup> Andrew Heywood dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 16

setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.<sup>13</sup>

Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).<sup>14</sup> Oleh karena itu, politik adalah suatu kegiatan dalam mempengaruhi perilaku orang lain maupun kegiatan mengendalikan pembuatan keputusan agar berjalan sesuai dengan keinginan pelaku/aktor.

### 2.3. Oligarki Politik

Oligarki termasuk salah satu konsep yang paling banyak digunakan namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. *Internasional Encyclopedia of Social Sciences* mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani *oligarkhia* (pemerintahan oleh yang sedikit), yang terdiri atas kata *oligoi* yaitu sedikit dan *arkhein* (memerintah).<sup>15</sup> Pengertian singkat minoritas yang menguasai mayoritas kurang memadai dan terlalu sederhana untuk menjelaskan tentang oligarki. Oleh karena itu Jeffrey A. Winters, seorang Profesor di Northwestern University mengkonstruksi ulang pemahaman tentang oligarki.

<sup>13</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hlm. 18

<sup>14</sup> Peter Merkl dalam Miriam Budiardjo, hlm. 16

<sup>15</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarkhi Terj.*, hlm. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

Menurut Winters, oligarki tidak hanya sebatas sekelompok elit yang berkuasa atau minoritas yang menguasai mayoritas. Oligarki berbeda dengan minoritas lainnya karena dasar kekuasaan mereka adalah kekayaan material yang sukar untuk dipecah dan diseimbangkan. Kekuasaan oligarki sulit dipecah dan jangkauan sistemik walaupun berposisi minoritas dalam suatu komunitas.<sup>16</sup>

Menurut winters, pemahaman atas oligarki bermula dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem. Meskipun dalam demokrasi memandang kesetaraan kedudukan dan akses terhadap proses, kenyataannya kekayaan yang sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah termasuk dalam demokrasi. Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan material, semakin besar pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya. Dengan demikian, ketidaksetaraan yang besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan pengaruh politik. Klaim tersebut didasarkan pada hubungan yang erat antara uang (kekayaan) dan kekuasaan yang menyebar dalam sistem politik manusia.<sup>17</sup>

Berdasarkan fakta tersebut, Winters mulai menjelaskan mengenai Oligarki dari pendefinisian oligark terlebih dahulu. Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

eksklusifnya,<sup>18</sup> sedangkan oligarki merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Oligark).<sup>19</sup>

Pernyataan Winters juga memiliki kesamaan dengan pandangan Vedi R Hadiz dan Richard Robison, dimana mereka menggunakan kerangka konsep ekonomi politik. Melalui pendekatan neo-Marxis, Hadiz dan Robison mendefinisikan oligarki sebagai hasil dari kondisi kapitalisme lanjutan di wilayah pinggiran. Konsep oligarki menurut Hadiz dan Robison tidak semua dilihat pada sumber daya material (ekonomi), tetapi juga berkaitan dengan relasi kekuasaan (kuasa politik). Hadiz dan Robison memandang oligarki sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa berdasarkan pandangan Hadiz dan Robison, oligarki membentuk suatu jejaring kolektif dengan akumulasi sumber daya material(ekonomi) yang melimpah dan juga berkuasa secara politik. Bagi Hadiz dan Robison, sebagaimana diuraikan oleh Ford dan Pepinsky, apa yang fundamental dari oligarki ialah sifat kolektif dari oligarki serta hubungan yang saling berkait antara konflik atas kekayaan dan otoritas politik.<sup>20</sup>

Di Indonesia, oligarki ini lahir dari proses yang menyedjarah sejak rezim Orde Baru. Menurut Hadiz, Orde Baru memiliki ciri oligarki kapitalis yang ditandai dengan tiga karakteristik. Pertama, suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan “secara instrumental” (tidak sekadar struktural) memanfaatkan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>20</sup> Atika Nur Kusumaningtyas, dkk, *Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal*, (Vol. 14, No. 2, 2017).

kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikuk dengan kekuatan koersifnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kedua, hubungan negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis terhadap kelompok civil society. Ketiga, suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Soeharto sendiri dengan poros di Cendana. Sistem patronase ini menjalar dan menembus ke semua lapisan masyarakat dari Jakarta, provinsi, kabupaten, hingga ke desa-desa.<sup>21</sup>

Guncangan krisis ekonomi pada akhir periode 1990-an dan runtuhnya Orde Baru bukan berarti membuat jejaring oligarki tersebut kehilangan kekuasaan ekonomi dan politiknya. Tetapi, mereka bertransformasi dengan mengikuti perubahan-perubahan politik untuk tetap menguasai sumber daya material. Salah satu upaya bertahan hidup dari jaringan oligarki Orde Baru dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang disediakan desentralisasi. Dengan didukung kekayaan material yang berlimpah, jaringan oligarki lama ini berusaha tetap menjadi kekuatan dominan di tingkat lokal. Hal itu dilakukan dengan menguasai partai politik, memainkan politik uang dan suap, dan mengerahkan aparat kekerasan non-negara.<sup>22</sup>

Menurut Winters, semua oligarki bisa digolongkan menurut empat ciri utama, yaitu kadar keterlibatan langsung Oligarki dalam pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas harta dan kekayaan; keterlibatan Oligark

---

<sup>21</sup> D. D. Ananda, *Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014*, (Vol. 2, No. 5, 2017).

<sup>22</sup> *Ibid.*

dalam kekuasaan atau pemerintahan; sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan itu, apakah terpecah atau kolektif; dan Oligark bersifat liar atau jinak.<sup>23</sup>

Dari ciri di atas, Winters membuat empat tipe ideal dari Oligarki, antara lain, pertama, oligarki panglima (*warring oligarchy*), yaitu Oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa (kekerasan. Setiap Oligark memiliki senjata untuk mendapatkan kekayaan. Ia memiliki tentara dan berebut secara langsung sumber daya material dengan Oligark lain. Pada dunia seperti itu, perpecahan antar Oligark berada di tingkat tertinggi, sehingga persekutuan tidak stabil. Konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral antar Oligark panglima.<sup>24</sup>

Tipe kedua adalah oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarchy*). Oligark jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Dalam Oligarki penguasa kolektif ini, para Oligark bekerja sama untuk mempertahankan kekayaannya dan memerintah suatu komunitas. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah kolektif dilembagakan dalam suatu badan pemerintah yang isinya Oligark semuanya. Secara historis, contoh dari bentuk oligarki penguasa kolektif bisa ditemui dari komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma, juga menurut Winters adalah praktek politik di Indonesia pasca Soeharto.<sup>25</sup>

Ketiga, oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*), bentuk oligarki yang sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan oligark. Hubungan antara Oligark bersifat patron-klien terhadap Oligark yang berkuasa tersebut. Wewenang dan kekerasan hanya dikuasai oleh penguasa utama, sedangkan para Oligark lainnya

---

<sup>23</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarkhi Terj.*, h. 48.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

menggantungkan pertahanan kekayaan dan hartanya pada Oligark tunggal tersebut. Para penguasa Oligark mengalahkan kapasitas Oligark di bawahnya, biasanya dengan mekanisme alat kekerasan negara atau mencampurkan dengan sarana pemaksa individu. Para Oligark bawahan yang tidak bersenjata kemudian mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian sumber daya yang dimilikinya kepada Oligark Sultanistik. Dengan itu, oligark penguasa berkewajiban melindungi Oligark-Oligark di bawahnya. Salah satu contoh mengenai Oligarki Sultanistik ini pada rejim Soeharto di Indonesia.<sup>26</sup>

Keempat, oligarki jinak dan liar. yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark menyerahkan kekuasaannya pada lembaga non-pribadi dan terlembaga dimana hukum lebih kuat. Oligarki jenis ini disebut dengan Oligarki Sipil. Karena hak milik dan pertahanan harta telah disediakan oleh negara, maka fokus Oligark hanya pada pertahanan pendapatan, yaitu upaya untuk mengelak dari jangkauan negara untuk mendistribusi kekayaan, misal melalui pajak progresif. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis dan melibatkan pemilu.<sup>27</sup>

## 2.4. Kekuasaan

### 2.4.1. Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan (kapabilitas) untuk menguasai atau memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

mangatasi perlawanan orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain.<sup>28</sup>

Kekuasaan mempunyai unsur influence, yakni menyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur persuasion, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur coercion, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur force atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.<sup>29</sup>

Menurut Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.<sup>30</sup>

Dalam bukunya *The History of Sexuality Vol. I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yaitu<sup>31</sup>

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah,

---

<sup>28</sup> H. Rachmat, Dadang Gunawan, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 78.

<sup>29</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA Press, 2009), hlm. 32-33.

<sup>30</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, (Vol. 18, No. 1, 2013).

<sup>31</sup> Foucault, Michael, *The History of Sexuality: An Introduction*, Ed. 1, (New York: Pantheon Books, 1978), hlm. 94-95.

tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.

2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Selanjutnya, Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai “kesempatan bagi seseorang atau kelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam bentuk suatu aksi sosial, baik terhadap mereka yang menentang kehendak itu maupun terhadap yang mengikutinya. Poin penting dari definisi ini adalah kekuasaan tidak dimaknai sebagai pengaruh tetapi lebih pada tindakan seseorang. Singkatnya, Weber memahami kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sekalipun ada perlawanan.”<sup>32</sup>

Max weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan, yang dimaksudkannya dengan wewenang (*authority*) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

---

<sup>32</sup> Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 23.

yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat.<sup>33</sup> Jenis authority yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian ini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.<sup>34</sup>

Sedangkan Prof. Dr. A. Hoogerwerf dalam bukunya *Politologie*, kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah-laku oleh orang-orang lain sesuai dengan tujuan-tujuan sang aktor sendiri. Maka kekuasaan politik adalah kemungkinan mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah serta perwujudannya dan dampaknya sesuai dengan tujuan-tujuan sang aktor sendiri.<sup>35</sup>

Penggunaan kemungkinan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sesuai dengan tujuan sang aktor adalah penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang efektif sering dinamakan penguasaan (“control”). Politik tanpa penggunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda.<sup>36</sup> Kekuasaan kadang-kadang buka merupakan tujuan, tetapi suatu sarana atau tujuan-antara untuk tujuan-tujuan lain.<sup>37</sup> Karena pada dasarnya kekuasaan politik itu merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-

---

<sup>33</sup> Hotman Siahaan, *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1986), hlm. 201.

<sup>34</sup> George Ritzer & Douglad J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta :Kencana, 2007) , hlm. 37.

<sup>35</sup> A. Hoogerwerf, *Politologie terj*, (Jakarta: Erlangga, 1979), hlm. 144.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.<sup>38</sup>

#### 2.4.2. Dimensi Kekuasaan

• Untuk memahami fenomena kekuasaan politik secara tuntas, konsep kekuasaan dapat ditinjau dari tiga dimensi berikut.<sup>39</sup>

##### a. Dimensi Potensial dan Aktual

Seseorang yang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila ia mempunyai atau memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang yang dipandang memiliki kekuasaan aktual, apabila ia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan-kegiatan politik secara efektif.

##### b. Dimensi Konsensus dan Paksaan

Penganalisis politik yang menekankan aspek paksaan dari kekuasaan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertarungan, dominasi, dan konflik. Mereka melihat tujuan yang hendak dicapai oleh elit politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan, tetapi menyangkut kepentingan kelompok kecil masyarakat. Sebaliknya, para analisis politik yang lebih menekankan aspek consensus dari kekuasaan cenderung melihat elit politik sebagai orang yang sedang berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>38</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, hlm. 31.

<sup>39</sup> H. Rachmat, Dadang Gunawan, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, hlm. 79-80

### c. Dimensi Langsung dan Tidak Langsung

Kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui perantara. Adapun kekuasaan tidak langsung adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik.

#### 2.4.3. Sumber Kekuasaan

Sumber daya kekuasaan sebagai hal yang tentunya harus terpenuhi terlebih untuk mencapai kekuasaan politik. dahulu Menurut Charles F. Adrian seperti yang dikutip oleh P. Antonius Sitepu, sumber daya kekuasaan atau tipe sumber daya kekuasaan dibagi menjadi lima, yaitu:<sup>40</sup>

##### a. Tipe sumber daya fisik

Tipe sumber daya fisik seperti senjata, senapan bom, rudal, penjara, kerja paksa, teknologi dan aparat yang menggunakan senjata-senjata itu dan sebagainya yang sejenis dengan itu. Motivasi untuk mematuhi, (B) berusaha untuk menghindari cedera fisik yang disebabkan oleh (A). Pada masyarakat yang maju, senjata modern seperti nuklir dan misil tidak dipergunakan untuk mempengaruhi proses politik dalam negeri. Di negara itu, senjata modern berfungsi sebagai penangkal (deterrent) dan sumber pengaruh dalam percaturan politik internasional. Dalam negara-negara berkembang, senjata konvensional tidak hanya

<sup>40</sup> P. Antonius Sitepu, *Teori-Teori Politik.*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h . 55-56.

dipergunakan untuk mempertahankan kedaulatan dari penetrasi luar, tetapi juga mematahkan oposisi dan kelomok-kelompok yang dianggap menentang kekuasaan dengan alasan demi ketertiban dan kestabilan.

b. Tipe sumber daya ekonomi

Tipe ini misalnya kekayaan (uang, emas, tanah, barang-barang berharga, dan surat-surat berharga), dan harta benda, pendapatan, serta kontrol atas barang dan jasa. Motivasi untuk Mematuhi, (B) berusaha untuk memperoleh kekayaan dari (A). Mereka yang memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar, setidaknya secara potensial akan memiliki kekuasaan politik. Para bankir, industrialis, pengusaha, dan tuan-tuan tanah adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan politik potensial. Pengaruh pemilik kekayaan ini timbul tidak hanya karena pembuat dan pelaksanaan keputusan politik dapat “dibeli” secara langsung dengan uang, akan tetapi secara tidak langsung pemerintah dapat dipengaruhi dengan melalui lembaga-lembaga ekonomi, seperti pasar, bank, perdagangan dan pelayanan masyarakat lainnya yang menguasai kehidupan masyarakat.

c. Tipe sumber daya normatif

Sumber daya normatif misalnya moralitas, kebenaran, tradisi, religius, legitimasi, dan wewenang. Motivasi untuk Mematuhi, (B) mengakui bahwa (A) memiliki hak moral untuk mengatur perilaku (B). Sementara itu, para pemimpin agama dan pemimpin suku, ditaati oleh anggota masyarakatnya bukan karena senjata atau kekayaan yang mereka miliki namun kebenaran agama yang “diwakili” dan disebarluaskan oleh pemimpin agama, dan adat dan tradisi yang dipelihara dan ditegakkan oleh pemimin suku tersebut. Selain itu, sebagian

anggota masyarakat menaati kekuasaan atau kewenangan pemerintah bukan karena takut paksaan fisik atau takut akan kehilangan pekerjaan, melainkan melulu karena kesadaran hukum demi ketertiban umum dan pencapaian tujuan masyarakat-negara.

d. Tipe sumber daya personal

Sumber ini seperti kharisma pribadi, daya tarik, persahabatan, kasih sayang, popularitas, dan sebagainya sejenis dengan itu. Motivasi untuk Mematuhi, (B) mengidentifikasi diri (merasa tertarik) dengan (A). Penampilan bintang terkenal, pemain sepakbola yang cemerlang, penyanyi yang terkenal dan dipuja orang ataupun pemimpin yang kharismatik, merupakan sumber kekuasaan popularitas pribadi (pribadi terkenal). Pengaruh orang-orang ini terutama muncul rasa kagum orang-orang yang dipengaruhi terhadap mereka.

e. Tipe sumber daya ahli

Seperti misalnya informasi, pengetahuan, intelegensi, keahlian teknis dan sebagainya sejenis dengan itu. Motivasi untuk Mematuhi (B) merasa bahwa (A) mempunyai pengetahuan dan keahlian yang lebih. Pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, merupakan sejumlah bentuk kekuasaan keahlian. Para dokter di daerah pedesaan, para ahli ekonomi, dan insinyur serta para ilmuwan lainnya yang berada di daerah perkotaan, cenderung memiliki pengaruh yang cukup besar karena keahlian tersebut.

## 2.5. Bisnis

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “*bisnis*” diambil dari bahasa Inggris “*bussines*”<sup>41</sup>. Bisnis merupakan suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar bisnis adalah usaha yang dijalankan yang tujuan utamanya adalah keuntungan.<sup>43</sup> Hal tersebut juga senada dengan pandangan Griffin dan Ebert bahwa bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba.<sup>44</sup>

oleh karena itu bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan tergantung skupnya, Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha yaitu kesatuan yuridis(hukum), teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya “*bisnis pertelevisian*”. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan kegiatan menciptakan barang atau jasa oleh seseorang atau kelompok dalam

---

<sup>41</sup> Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hlm. 25

<sup>42</sup> Amirullah, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 2

<sup>43</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Ed Revisi, (Jakarta : Prenada Media, 2012), hlm. 7

<sup>44</sup> Griffin dan Ebert, *Bisnis*, (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 4

<sup>45</sup> Top Lintas, *Pengertian bisnis*, diakses pada 4 Agustus 2019 dalam <https://m.toplintas.com>

rangka meraih keuntungan. Individu atau kelompok yang melakukan bisnis disebut dengan pebisnis.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian kualitatif dimana bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>46</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif-analitik.<sup>47</sup> Deskriptif analitik artinya mengumpulkan data, mengklarifikasi, menggambarkan, menguraikan kemudian menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari penelitian.<sup>48</sup> Hal ini dapat mempermudah penulis dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

#### 3.2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>49</sup> Data ini didapatkan dengan meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Sumber

---

<sup>46</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

<sup>47</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

<sup>48</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

<sup>49</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 9.

utama dalam penelitian ini adalah pemerintah Nagan Raya (bupati atau wakil Bupati), dan pengusaha yang terjun ke politik Nagan Raya. Kemudian juga masyarakat yang akan dipilih secara random. Selanjutnya data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya melainkan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.<sup>50</sup> Data ini meliputi buku-buku, jurnal, surat kabar, skripsi dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.<sup>51</sup>

#### b. Observasi

Teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati objek yang diteliti atau hal-hal yang terkait dan relevan dengan penelitian.<sup>52</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan

<sup>50</sup> Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 45.

<sup>51</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, hlm. 49-50.

<sup>52</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 63.

sebagainya.<sup>53</sup> Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3.4. Objek Penelitian

#### 3.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya. Alasan memilih tempat tersebut dikarenakan pada pilkada 2017 yang lalu, pemilihan berhasil dimenangkan oleh pasangan Jamin Idham dan Chalidin Oesman, keduanya merupakan pebisnis sukses dibidangnya. Ini untuk pertama kalinya Nagan Raya dipimpin oleh orang yang berbeda fokus utama pada pengembangan perekonomian dan mewujudkan masyarakat yang produktif dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi, dimana sebelumnya lebih kearah pembangunan (sarana dan prasarana). Sejauh ini, pebisnis lain juga terlibat langsung dalam politik Nagan Raya, mereka ikut bergabung kedalam partai atau mencalonkan diri menjadi DPRK Nagan Raya. Mereka diduga memiliki tujuan lainnya seperti memperluas bisnis mereka melalui kekuasaan yang mereka dapat. Oleh karena itu, Nagan Raya menjadi tempat yang menarik untuk diteliti dalam rangka menemukan apakah jabatan politik mampu memperluas bisnis serta tanggapan masyarakat mengenai pebisnis yang masuk ke ranah politik di Nagan Raya.

#### 3.4.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang oleh peneliti akan dijadikan sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini subjeknya adalah pemerintah Nagan Raya (bupati atau wakil Bupati) yang merupakan pebisnis yang jadi penguasa. Peneliti

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 114.

akan melihat bagaimana kebijakan mereka setelah jadi bupati/wakil bupati. Kemudian Puji Hartini (Calon DPRK Nagan Raya), ia seorang pebisnis juga. Disini peneliti ingin mengetahui apa tujuan atau alasannya terjun ke politik. selain itu, ada Tgk. Samsuar atau disapa Wan Malaya, ia adalah pebisnis sukses Kuala Lumpur sekaligus Ketua Partai Aceh Nagan Raya, ia terjun ke politik namun tidak memiliki jabatan politik. Peneliti akan melihat bagaimana pengaruh jabatan politik dan yang tidak ada jabatan terhadap pengembangan bisnis. Kemudian juga masyarakat Nagan Raya yang dipilih secara acak dan paham tentang politik.

### 3.5. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>54</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>55</sup> Aktivitas dalam menganalisis data yaitu:

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan

cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Nagan Raya

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di wilayah pantai barat-selatan Provinsi Aceh dengan ibukotanya Suka Makmue. Kabupaten ini terbentuk secara definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tepatnya tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya sebesar 3.544,91 km<sup>2</sup> (354,491 ha), atau sekitar 6,25 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh. Secara geografis, wilayah Kabupaten Nagan Raya termasuk kedalam zona dataran rendah atau datar yang berada pada titik kordinat antara 03°40'-03°38' Lintang Utara dan 96°11' - 96°48' Bujur Timur. Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, kabupaten ini berada pada ketinggian 0 sampai dengan 800 meter dari permukaan laut.<sup>56</sup>

Kata Nagan berasal dari kata seunagan yang menunjukkan lima kecamatan pemekaran, sedangkan kata raya berarti besar. Hal ini menunjukkan harapan agar kelima kecamatan tersebut akan menjadi besar nantinya.<sup>57</sup>

Di awal pembentukannya, Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan, dan Seunagan

---

<sup>56</sup> Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Nagan Raya 2012-2017 dalam [naganrayakab.go.id/](http://naganrayakab.go.id/). Diakses 26 Juni 2019.

<sup>57</sup> Nagan dalam Angka Raya 2017.

Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran kecamatan merupakan keharusan. Hingga akhir tahun 2012, Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 kecamatan, 222 desa, dan 30 mukim, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Luas wilayah antar kecamatan bervariasi. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Darul Makmur dan Kecamatan Beutong. Luas wilayah Darul Makmur dan Beutong masing-masing mencapai 30,38 persen dan 28,70 persen dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Luas wilayah yang relatif kecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 1,45 persen dan Kecamatan Seunagan 1,60 persen.<sup>59</sup>

Sejak berdirinya Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2002, H.T. Zulkarnaini atau biasanya di sapa “Ampon Bang” telah memegang stempel kekuasaan sebagai Pejabat Sementara Bupati Nagan Raya dari tahun 2002-2006.

<sup>58</sup> *Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Nagan Raya 2012-2017.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

Kemudia Ia terpilih kembali sebanyak dua kali dan memimpin Nagan Raya sampai tahun 2017 yang lalu. Sekarang ini, roda pemerintahan Nagan Raya di bawah naungan pasangan pebisnis yaitu Jamin Idham dan Chalidin Oesman sebagai Bupati dan Wakil Bupati hingga 2022 nanti.

#### 4.1.2. Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya

Pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya ditandai dengan plantikan Pj. Bupati pada tanggal 22 juli 2002 yang juga merupakan Hari Jadi Kabupaten Nagan Raya. Pada awal berdirinya Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki lima kecamatan saja, namun sekarang sudah menjadi sepuluh kecamatan.<sup>60</sup> Diawal-awal terbentuknya Kabupaten Nagan Raya, untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Pusat Pemerintahan di terletak di Jeuram Kecamatan Seunagan. Hal ini disebabkan Komplek Perkantoran Suka Makmue belum selesai pembangunannya dan pada Tahun 2008 Pusat Pemerintahan baru mulai pindah ke lokasi yang saat ini kita berada.<sup>61</sup>

Kabupaten Nagan Raya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahunan. Kemudian Susunan pemerintahan daerah Kabupaten Nagan Raya periode 2014–2019 terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretariat daerah, sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan desa. Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, dan sekretariat DPRK dipimpin oleh sekretaris DPRK. Sekretariat DPRK terdiri dari 4 komisi yaitu

<sup>60</sup> *Nagan Raya dalam Angka 2017*

<sup>61</sup> Novita Gustian Ningsih, *Afiliasi Politik Suku Jawa Dalam Pilkada Nagan Raya 2017*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

komisi “A” Bidang Pemerintahan, Komisi “B” Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi “C” Bidang Pembangunan dan Komisi “D” Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh.<sup>62</sup>

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas Daerah di Kabupaten Nagan Raya diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Syariat Islam; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; Dinas Kesehatan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perkebunan; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; Dinas Sosial. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat. Sedangkan Desa adalah daerah pemerintahan yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perdesaan sesuai dengan peraturan tertentu.<sup>63</sup>

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mendapatkan suatu apresiasi tertinggi dari badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 4 kali berturut – turut yaitu sejak tahun 2008-2011. Dan

<sup>62</sup> *Nagan Raya dalam Angka 2017* .

<sup>63</sup> *Ibid.*

ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah dan seluruh masyarakat Nagan Raya karena dari sekian banyak kabupaten yang ada di pesisir barat Provinsi Aceh, hanya Nagan Raya yang mampu mendapatkan predikat tersebut.<sup>64</sup>

#### 4.2. Alasan dan Motif Pebisnis Terjun ke Dunia Politik

Pebisnis terjun ke politik merupakan sebuah fenomena yang tak dapat dibendung lagi. Tentu saja karena mereka juga memiliki hak sebagai seorang warga negara khususnya Indonesia. Apalagi calon yang memiliki sumber daya material berupa kekayaan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam pesta demokrasi. Mereka berhak untuk terjun ke Partai Politik, mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pilihan Legislatif (Pileg) dan lainnya.

Politik adalah salah satu alat untuk mencari kekuasaan. Dengan memiliki kekuasaan maka seseorang dapat memanfaatkan kekuataannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau biasa disebut juga penggunaan kekuasaan. Dalam mendapatkan kekuasaan, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ia butuh sumber daya dalam meraih kekuasaan. Pebisnis yang terjun ke politik di Nagan Raya, setidaknya ada sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan jabatan politik. Diantaranya kekayaan dan kekuatan koneksi.

Kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain agar berjalan sesuai dengan keinginan sang aktor. Mengapa demikian? Karena hidup membutuhkan biaya yaitu uang. Kemudian melakukan berbagai kegiatan juga membutuhkan biaya. Jamin Idham adalah pebisnis kelapa sawit dan memiliki perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit

---

<sup>64</sup> Novita Gustian Ningsih, *Afiliasi Politik Suku Jawa Dalam Pilkada Nagan Raya 2017*

yaitu PT. Ujong Neubok Dalam yang berlokasi di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan kekayaan yang dilaporkan sebanyak 80 miliar lebih.<sup>65</sup> Begitu juga dengan Chalidin Oesman yang merupakan Komisaris PT. Lio Inti Nusantara dengan kekayaan mencapai 35M lebih.<sup>66</sup> Begitu juga dengan Puji Hartini pebisnis asal Jakarta, dia adalah Direktur Utama dari PT. Mutiara Tiga Berlian. Selain itu mereka juga memiliki koneksi seperti Jamin Idham melalui partner bisnis dan karyawannya. Kemudian Chalidin Oesman, selain pebisnis dia adalah ketua Ikatan Keluarga Nagan Raya dan Garda Teuku Umar di Jakarta. Kemudian Puji Hartini juga memiliki koneksi dengan Chalidin Oesman karena satu organisasi di IKNR dan juga teman dekat suaminya, ketika Puji Hartini mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, Chalidin Oesman sudah menjabat sebagai wakil bupati. Melalui sumber daya tersebut, mereka mendapatkan kekuasaan di Nagan Raya.

Jika ditanya kenapa terjun ke politik, maka tak dapat dipungkiri bahwa jawaban untuk mengabdikan pada masyarakat adalah salah satunya. Dimana jabatan politik digunakan untuk berkontribusi pada masyarakat dan daerah. Puji Hartini yang merupakan Direktur Utama PT. Mutiara Tiga Berlian memutuskan berkarir di dunia politik dengan alasan ingin mengabdikan kepada masyarakat dan memimplementasikan pengalamannya yang telah didapat selama menjadi seorang pebisnis. Ini merupakan suatu hal positif mengingat mereka adalah orang-orang

---

<sup>65</sup> Aceh Terkini, *Jamin Idham, Calon Kepala Daerah Terkaya di Aceh, Baca Daftar Lengkapnya*, 16 November 2016, dalam <https://www.acehterkini.com/2016/11/jamin-idham-calon-kepala-daerah-terkaya-baca-daftar-lengkapnya.html>, Diakses 26 Juni 2019.

<sup>66</sup> Media Aceh, *Ini Calon Wakil Bupati Terkaya di Aceh*, 8 Oktober 2016, dalam <http://mediaaceh.co/2016/10/ini-calon-wakil-bupati-terkaya-di-aceh/>, Diakses 26 Juni 2019.

yang sukses dalam mengembangkan ekonominya. Pengalaman itu bisa menjadi potensi bagi mereka dalam meningkatkan perekonomian di Nagan Raya.

“Saya terjun ke politik dengan tujuan untuk membantu, mengabdikan ke masyarakat yang ada di Nagan Raya. Kalau dilihat dari segi bisnis, memang jauh lebih enak di Jakarta. Namun mengingat kita ingin membangun suatu kedekatan dengan masyarakat di Nagan Raya bagaimana supaya lebih maju. Paling tidak saya terpanggil untuk mempercepat kemajuan di Nagan Raya. Di satu sisi ketika seorang pebisnis sudah mempunyai pola pikir dan cara pandang yang dimana dia bisa mengimplementasikan pengalaman yang sudah didapat untuk dibawa ke daerah sehingga daerah itu akan lebih maju tergantung dari apa nanti prioritas yang akan dijadikan target pembangunan (Puji Hartini, Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, wawancara 09 April 2019).

Dari wawancara di atas bisa dilihat bahwa seorang pebisnis sangat mementingkan atau yang mereka pikirkan terutama sekali adalah perekonomian. Mengembangkan ekonomi merupakan visi yang sangat cocok dengan statusnya. Kemudian kata-kata itu memiliki pengaruh sendiri kepada masyarakat Nagan Raya dalam memberikan dukungannya. Alasan yang senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Nagan Raya Chalidin Oesman yang sebelumnya merupakan Komisaris Utama PT. Lion Inti Nusantara, bahwa ia ingin menjadikan politik sebagai alat untuk mengabdikan kepada masyarakat.

“politik itu adalah langkah atau kendaraan untuk mencapai sesuatu. Jadi ada sebagian mengatakan politik itu jahat, ada sebagian mengatakan politik itu baik. Tetapi sebenarnya politik itu hanya alat. Kita punya parang atau cangkul, ketika cangkul itu digunakan dengan baik maka akan menumbuhkan padi, tetapi ketika cangkul itu dipegang oleh orang jahat bisa melukai orang-orang baik. Begitu juga kenapa turun ke politik karena politik ini adalah abang jadikan sebagai alat untuk mengabdikan kepada masyarakat. Dari pengusaha terjun ke politik, mengambil alat politik sehingga dari politik itulah sekarang bisa menjadi wakil bupati (Chalidin Oesman, Wakil Bupati Nagan Raya, wawancara 10 April 2019).

Mengabdikan kepada masyarakat terbuka untuk siapa saja, tidak peduli apa latar belakangnya. Siapa saja berhak melakukannya. Begitu juga dengan pebisnis yang terjun ke politik, selama ingin membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat itu tidak jadi sebuah masalah. Selama mereka mampu memimpin dan menjalankan roda pemerintahan, maka tidak jadi sebuah persoalan, sah-sah saja.

Alasan seseorang terjun ke politik cenderung dengan status yang disematkan. Maksudnya latar belakang perjalanan hidupnya menjadi buah pikir tujuannya terjun ke politik. Keinginannya adalah cerminan dari siapa dia. Seseorang yang berasal dari Dayah maka dia akan memikirkan tentang agamanya. Seorang tokoh perjuangan maka dia akan memikirkan perjuangannya atau memperjuangkan kembali cita-cita yang belum tercapai. Hal ini dibuktikan dengan ucapan dari seorang pengusaha yang juga memiliki latar belakang sebagai seorang anak Dayah dan juga seorang mantan kombatan.

“Sebenarnya terjun ke dunia politik, yang pertama seperti kami berasal dari Dayah, jadi setelah itu kami juga termasuk terlibat dengan perjuangan. Jadi terjun ke politik ini yang pertama adalah tanggung jawab atas bangsa Aceh, yang pada saat ini khusus Nagan Raya masih sangat memperhatikan tentang anak-anak korban konflik dan tentang kombatan-kombatan dan perempuan-perempuan janda belum sepenuhnya ada kepedulian baik daripada atas maupun ditempat kita ini. Tidak. Kemudian dengan menyangkut dengan agama. Hari ini pihak kami daripada saya kalau tidak terjun ke politik tempat ini akan diisi oleh orang-orang yang tidak paham sehingga akan mengacaukan ataupun akidahnya bukan tujuannya. Seperti dasar membangun perjuangan ini kami ingin membangun Daulah Allah, maksudnya agama didepan. Ulama-ulama menjadi payung pada kami-kami ini. Jangan sempat kita khusus Aceh yang punya indatu kita hilang. Agama adat reusam ini hilang, jadi oleh karena itulah saya sanggup spend time atau mempergunakan waktu untuk terjun politik dalam mencapai cita-cita bangsa Aceh banyak yang tertangguh atau masih banyak yang belum selesai (Tgk. Samsuar, Ketua DPW Partai Aceh Nagan Raya, wawancara 10 April 2019)”

Dari hasil wawancara diatas, bisa diketahui bahwa selain mengembangkan perekonomian masyarakat, pebisnis juga ingin menegakkan agama dan memperjuang kembali cita-cita bangsa Aceh. Hal tersebut dikarenakan Tgk. Samsuar atau sering disapa Wan Malaya yang merupakan pebisnis sukses Kuala Lumpur (CEO PT. Medicine) dia juga memiliki latar belakang sebagai anak Dayah dan juga Kombatan. Wan Malaya ingin memberikan kepedulian terhadap korban konflik, menjadikan agama berjalan didepan dengan ulama sebagai payungnya serta memperjuangkan cita-cita Aceh yang menurutnya masih belum terselesaikan.

Pebisnis masuk ke dalam politik tujuannya memang bukan hanya masalah ekonomi. Namun ekonomi merupakan salah satu tujuannya. Hal tersebut tidak terlepas dari politik dan bisnis yang saling berhubungan. Politik membutuhkan dana, dan pebisnis memilikinya. Pebisnis membutuhkan politik dalam memperlancar bisnisnya, salah satu cara lebih mudah adalah dengan mendapatkan jabatan politik. Kepentingan bisnis yaitu membuat bisnis semakin berkembang, dan dibutuhkan kepentingan politik disana, yaitu kebijakan politik yang sejalan dan relevan dengan kepentingan bisnis tersebut. pebisnis sukses memang memiliki kekayaan yang melimpah, namun tidak memiliki power atau kekuasaan dalam daerah atau negara, dengan menjadi pejabat maka dia memiliki keduanya.

Pebisnis yang berkarir dalam politik di Nagan Raya juga mengatakan bahwa memang ada rencana untuk membangun perusahaan atau industri, yang tujuannya untuk menambah lapangan kerja masyarakat. Namun disisi lain,

pembangunan perusahaan atau industri menguntungkan bagi mereka dari segi bisnis, yaitu terjadinya perluasan.

Kemudian juga disaat pebisnis memegang kekuasaan, maka jika dia ingin memperbesar kerajaan bisnisnya akan sangat mudah, membuat program dan implementasikan. Apalagi keputusan tentang perizinan dan Hak Guna Usaha (HGU) berada ditangan mereka. Penambahan HGU dan izin membangun bangunan bisa dilakukan melalui kekuasaan yang didapat, tinggal menerapkan kebijakan. Oleh karenanya, salah satu motif pebisnis berkarir di politik adalah mengekspansi bisnisnya.

#### **4.3. Jabatan Politik Dalam Memperbesar Bisnis**

Jabatan politik mempunyai pengaruh dalam memperbesar bisnis, dimana dengan adanya jabatan, maka ada kekuasaan, dengan adanya kekuasaan, maka segala urusan akan lebih mudah. Begitu juga sebaliknya, disaat kita bukan pemegang pemerintahan, maka program baik perluasan bisnis atau lainnya lebih sulit direalisasikan.

Puji Hartini mengatakan ia memiliki banyak program yang nantinya menjadi target untuk bisa direalisasikan didaerah. Terutama potensi apa didaerah yang sekiranya dapat dikembangkan, dan dijadikan sebagai motor untuk jalannya roda perekonomian masyarakat di Nagan Raya, ia akan membukakan peluang-peluang yang sekiranya bisa meningkatkan perekonomian. Salah satunya membangun perusahaan. Ia mengatakan, perusahaan itu mungkin nanti lebih diprioritaskan untuk masyarakat di Nagan sendiri, atau mungkin lebih dalam bentuk perusahaan yang intinya dikembalikan ke masyarakat. Namun pengelolaan

akan dibantu target untuk pemasarannya. Ia coba menghidupkan home industry. Namun tidak menutup kemungkinan akan berorientasi pemasaran sampai keluar.

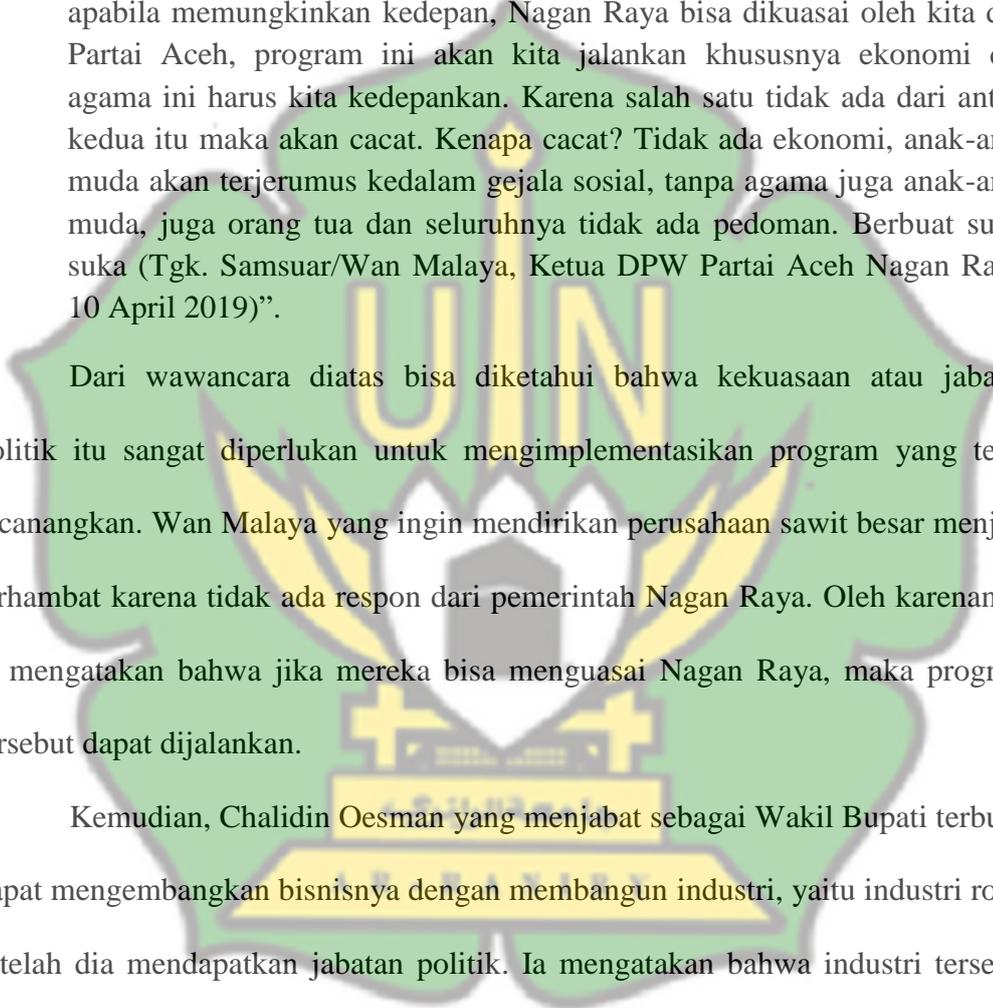
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia perlu kekuasaan dalam merumuskan atau memutuskan kebijakan. Tanpa hal tersebut akan sulit direalisasikan.

“....Kerena kalau memang pribadi kita tidak dapat menjangkau secara luas. Mungkin karena keterbatasan, tetapi ketika kita sudah diberikan kepercayaan bisa membantu masyarakat lebih luas iya, kenapa tidak (Puji Hartini, wawancara 09 April 2019)”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa jabatan politik memang terbukti dapat membantu dalam mencapai tujuan seperti memperluas bisnis atau program mereka yang lain. Tidak dapat dipungkiri, kekuasaan memang akan mempermudah jalan sang aktor untuk mewujudkan keinginannya. Tanpa jabatan politik, membangun sesuatu akan lebih sulit dari yang diperkirakan. Seperti Wan Malaya seorang pebisnis yang juga merupakan ketua DPW Partai Aceh, ia mengaku program-programnya seperti membangun perusahaan sawit tidak berjalan, dikarenakan tidak adanya respon dari pemerintah.

“.....Program-program lain yang ingin dibangun di Nagan Raya khususnya, yaitu Pabrik Sawit yang bisa diolah, diproses, tidak lagi kita bawa CPO ke luar, yang bisa minyak sawit itu sudah jadi dan dalam proses itu menjadi 36 items termasuk margarin, sabun, vitamin C, B Kompleks dan sebagainya, untuk ekspor sumatera 70 juta penduduk. Itu programnya, bisa menampung pekerja lebih kurang 8000 orang. Program itu sebenarnya sudah awal/lama, dalam pemerintahan Jadin dulu seandainya terpilih, saya akan kerjakan program tersebut. Ini sudah saya sampaikan kepada pemerintahan setempat, dan tidak ada respon sampai saat ini. Kami sudah buat pertemuan dengan pihak luar, kementerian luar, bahwasanya mereka sanggup datang kemari dengan catatan perjanjian ini betul-betul real. Jadi pihak pemerintah setempat baik pak wabup atau bupati sendiri tidak pernah merespon, termasuk ada program-program lain untuk membangun Nagan Raya, supaya anak-anak muda kita tidak terlibat dengan gejala

sosial. Saya lihat hari ini sangat menyedihkan, baik di Nagan maupun umumnya di Aceh pukul 1 atau 2 malam, anak-anak muda masih di warung kopi, lalai dengan game atau dengan hp. Jadi tidak pernah berpikir bagaimana untuk mem be up ekonomi, karena tanpa ekonomi kita akan cacat dari segi pergaulan, agama. Bagaimanaga tidak cacat, waktu tidak ada uang, yang kelihatan kan kandang ayam orang. Begitulah umpamanya.

- Jadi oleh karena itulah, program itu Insya Allah khusus Nagan Raya ini, apabila memungkinkan kedepan, Nagan Raya bisa dikuasai oleh kita dari Partai Aceh, program ini akan kita jalankan khususnya ekonomi dan agama ini harus kita kedepankan. Karena salah satu tidak ada dari antara kedua itu maka akan cacat. Kenapa cacat? Tidak ada ekonomi, anak-anak muda akan terjerumus kedalam gejala sosial, tanpa agama juga anak-anak muda, juga orang tua dan seluruhnya tidak ada pedoman. Berbuat suka-suka (Tgk. Samsuar/Wan Malaya, Ketua DPW Partai Aceh Nagan Raya, 10 April 2019)”.  


Dari wawancara diatas bisa diketahui bahwa kekuasaan atau jabatan politik itu sangat diperlukan untuk mengimplementasikan program yang telah dicanangkan. Wan Malaya yang ingin mendirikan perusahaan sawit besar menjadi terhambat karena tidak ada respon dari pemerintah Nagan Raya. Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa jika mereka bisa menguasai Nagan Raya, maka program tersebut dapat dijalankan.

Kemudian, Chalidin Oesman yang menjabat sebagai Wakil Bupati terbukti dapat mengembangkan bisnisnya dengan membangun industri, yaitu industri rotan setelah dia mendapatkan jabatan politik. Ia mengatakan bahwa industri tersebut dibangun dengan tujuan membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Walaupun demikian, tetap saja ini menunjukkan bahwa ia telah mengembangkan bisnisnya ke Nagan Raya, dan memang memiliki niat untuk membangun sebuah perusahaan.

“Membuka lapangan kerja seperti membangun perusahaan, ya. Sebagian memang kita punya arah kesitu. Bagaimana menciptakan lapangan kerja

yang seluas-luasnya. Tapi kita sudah mulai dari kecil-kecilan termasuk usaha rotan kita meskipun kecil, dan kita akan berusaha bagaimana kedepan bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya yang berada dibawah pemerintah di umb misalnya tetapi itu butuh waktu. Untuk sekarang saya hanya baru membangun industri rotan saja (Chalidin Oesman, Wakil Bupati Nagan Raya, wawancara 10 April 2019)”

Selanjutnya, Jamin Idham yang merupakan Bupati Nagan Raya juga dapat mengembangkan bisnisnya saat memiliki jabatan, seperti memperluas perusahaannya dengan menggunakan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ishani, ketua Ikatan Pemuda Nagan Raya (IPNR) yang dihubungi langsung oleh penulis.

“Perluasan bisnis itu ada. Didirikannya SPBU di Kuta Trieng, milik keluarga walaupun saat ini masih belum berdiri. Memperluas milik perusahaannya, kelapa sawit. Walaupun itu tidak kelihatan. Bahkan HGU itu juga ada penambahan, kita memang tidak tahu berapa tapi itu ada, seperti di daerah kalista alam, dan juga terdengar kabar bahwa dia juga mengalami kerugian, dikarenakan PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) juga maunya ditarik untuk dia, kepastian memang belum tentu ada. Namun Intinya memang ada terjadinya perluasan bisnis (Ishani, Ketua Umum IPNR, wawancara 12 Juli 2019)”.

Perluasan bisnis memang ada dilakukan walaupun tidak kelihatan, namun pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Rizki Pandu yang berjudul “Buruh dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Buruh perempuan di PT. Ujong Neubok Dalam Kabupaten Nagan Raya). Dalam skripsinya ia menulis bahwa pada tahun 2014, PT. UND memiliki luas perkebunan kurang lebih dua ribu hektar, dengan HGU kurang lebih seribu delapan ratus hektar.<sup>67</sup> Sedangkan sekarang ini, menurut seorang karyawan (anonim) di PT. Ujong Neubok Dalam, luas

---

<sup>67</sup> Rizki Pandu, *Buruh dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Buruh perempuan di PT. Ujong Neubok Dalam Kabupaten Nagan Raya)*, (Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2016).

perkebunan yaitu tiga ribu hektar. Bila didasarkan pada pernyataan tersebut, maka PT. UND memang memiliki perluasan HGU.

Kemudian juga, saat ini pemerintah Nagan Raya dianggap telah melakukan monopoli harga sawit, dimana harga sawit yang ditetapkan oleh PKS tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemerintah. Harga sawit dibeli dengan harga murah mulai Rp.780 sampai Rp.890,<sup>68</sup> yang menyebabkan petani sawit mengalami kerugian, sedangkan Pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tentu memiliki keuntungan dari adanya penurunan harga. Jamin Idham sendiri adalah salah satu pemilik PKS meskipun saat ini yang jadi Direktur Utama adalah anaknya Jamaluddin Idham, tetapi tetap saja bagian dari milik keluarga. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ketua Umum IPNR.

“Monopoli itu ada. Intinya monopoli seperti ini, harga penetapan Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah ditetapkan oleh panitia di Provinsi juga bagian daripada anggota itu ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Jadi 57 PKS di Aceh, Sembilan di Nagan Raya mereka masuk dalam panitia penetapan harga TBS. Ketua panitianya Pemerintah Aceh, ketua pelaksananya adalah Dinas Perkebunan Provinsi, dan anggota-anggotanya PKS seluruh Aceh. Sedangkan Bupati adalah sebagai Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan dan mereka dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBA). Tapi hari ini lemah pengawasannya ataukah ada mafia TBS. Dan mafia itu ada disekitar Darul Makmur. Orangnya tidak bisa kita kasih tahu. Mafia itu juga dari PKS tersebut juga. Yang perlu diketahui adalah harga TBS itu tidak boleh ditetapkan oleh PKS, karena tidak ada pegang hukum. Karena penetapan TBS itu harus bersama dengan pemerintah. Tetapi yang terjadi saat ini PKS menetapkan harga sendiri, itu tidak diberi otoritas oleh undang-undang. Menetapkan sebelah pihak tidak diberikan. Harga sawit 850-900 dibeli oleh PKS, padahal bukan begitu yang ditetapkan oleh pemerintah (Ishani, Ketua Umum IPNR, wawancara 12 Juli 2019)”.

---

<sup>68</sup> Zainun Yusuf, *Harga TBS Sawit di Nagan Ditetapkan Sepihak, Petani di Abdy Minta Pembelaan Pemerintah*, 18 Juni 2019, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/06/18/harga-tbs-sawit-di-nagan-ditetapkan-sepihak-petani-di-abdy-minta-pembelaan-pemerintah>, Diakses 1 Juli 2019.

Berdasarkan hal itu, bisa dilihat bahwa harga TBS dibeli dengan harga yang murah oleh PKS. Hal itu bisa disebut permainan harga, jika tidak, seharusnya Pemerintah khususnya Nagan Raya sebagai tim pengawas dapat mencegah hal tersebut terjadi melalui kekuasaan yang dimiliki. Namun kenyataannya, sampai saat harga TBS sawit masih saja rendah, tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang rata-rata diatas harga seribu. (*Data harga sawit yang ditetapkan pemerintah akan dilampirkan*). Dengan demikian, yang diuntungkan adalah pemilik PKS.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa jabatan politik terbukti mampu memperbesar bisnis. Hal itu dibuktikan dengan Chalidin Oesman yang memiliki jabatan politik mampu mengembangkan bisnisnya dengan membangun industri rotan, dan juga Jamin Idham sebagai Bupati mampu mengembangkan bisnis kelapa sawitnya. Tidak seperti Wan Malaya, meskipun ia terjun ke politik dengan menjabat sebagai ketua partai, program yang telah ia rancang yaitu membangun perusahaan sawit dalam skala besar sampai saat masih belum terlaksanakan. Itu dikarenakan tidak adanya kekuasaan atau jabatan politik yang dimilikinya.

#### **4.4. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pebisnis yang Terjun Ke Jalur Politik Di Nagan Raya**

Setelah mengamati sesuatu, di dalam kesadaran kita tertinggal kesan dari pengamatan itu. Hal ini disebut tanggapan. Sujanto mengatakan bahwa tanggapan adalah gambaran pengamatan yang tinggal di kesadaran kita setelah mengamati.<sup>69</sup> Hal itu berarti bahwa tanggapan adalah kesan yang tinggal dalam ingatan setelah dilakukannya pengamatan.

Berdasarkan definisi diatas dan dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan yaitu kesan yang muncul dalam ingatan yakni setuju atau tidaknya, baik atau tidaknya yang timbul dari masyarakat Nagan Raya terhadap pebisnis yang terjun ke politik di Nagan Raya dan tentang Nagan Raya yang sekarang ini dipimpin oleh pebisnis.

##### **4.4.1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pebisnis yang Terjun Ke Politik**

Tanggapan seseorang terhadap suatu hal tidak selalu sama. Terkadang juga memiliki perbedaan. Begitu juga dengan masyarakat Nagan Raya dalam memberi tanggapan mereka tentang pebisnis yang terjun ke politik. Ada masyarakat yang setuju dikarenakan seorang pebisnis memiliki cukup pengalaman dalam menumbuhkan perekonomian, namun ada juga yang kurang setuju dikarenakan seorang pebisnis tidak cukup memiliki pengalaman dalam bidang politik.

Secara umum masyarakat Nagan Raya tidak memperlakukan pebisnis yang terjun ke dunia politik asalkan memiliki kapasitas. Apalagi seseorang yang masuk ke ranah politik memang membutuhkan dana untuk membiayai politiknya.

---

<sup>69</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 31.

Baik untuk membiayai kampanyenya maupun keperluan lainnya seperti memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat agar mereka tertarik dan senang, yang akhirnya mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungannya. Salah satu yang memiliki biaya atau kekuatan dari segi materi adalah pebisnis. Oleh karena itu mereka sangat cocok dalam konstestasi politik jika dilihat dari segi kekayaannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat Nagan Raya dengan inisial AY.

“Memang yang harus dipahami bahwa politik Indonesia itu politik berbiaya tinggi. Jadi ada kesan disementara masyarakat bahwa seseorang yang terjun ke politik itu harus memiliki cukup biaya. Karena sistem kita memang membutuhkan biaya yang begitu tinggi dalam kontestasi politik. Apakah kemudian membayar kampanyenya dan lain-lain yang diperlukan. Dan terkait dengan cocok tidaknya itu tergantung kapasitas. Kalau kapasitas dia mumpuni untuk memimpin saya rasa tidak masalah latar belakang apapun untuk menjadi seorang pemimpin. Namun idealnya memang menjadi pemimpin itu punya track record di bidang politik, apakah dia pernah menjabat sebagai legislatif, kemudian indibirokrasi itu lebih cocok (AY, wawancara 19 Juni 2019)”.

Selain itu masyarakat Nagan Raya juga tidak mempermasalahkan apabila pebisnis memiliki tujuan lain seperti mengembangkan sayap bisnisnya. Menggunakan kekuasaan atau jabatan politik untuk mempertahankan kekayaan dan memperbesar bisnis bukanlah hal yang membuat masyarakat berpikir itu adalah masalah yang harus disingkirkan, dikarenakan siapa saja atau rata-rata akan melakukan hal serupa. Jika bukan dari pebisnis, maka yang lainnya juga dapat menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Apalagi jika dibangun perusahaan, sebenarnya itu juga bisa menjadi peluang bagi masyarakat, dimana terbukanya lapangan pekerjaan. Namun yang harus dipersiapkan adalah kemampuannya. Jika masyarakat memiliki kemampuan, maka perluasan bisnis

dari pebisnis yang masuk ke politik bisa menjadi hal yang sama-sama menguntungkan. Masyarakat dapat pekerjaan, dan pebisnis dapat memperbesar bisnisnya.

- “Siapapun saya setuju jadi pemimpin dengan syarat dapat membangun Nagan Raya. Kalau dia pebisnis tapi mampu memimpin, ya silahkan. Siapapun pokoknya. Kalau memang dibidang pebisnis ini terjun ke politik agar dia berkuasa, dan nanti bisa memajukan bisnisnya. Itu tidak masalah. Siapapun juga akan seperti itu. Jika bukan dari pebisnis, dia juga akan mencari kekayaan melalui jabatannya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah orang yang dapat memajukan daerah (SM, wawancara 15 Juni 2019)”.

“Bagi saya, jika pebisnis terjun ke politik itu biasanya selain ingin menjabat dia juga ingin bisnisnya agar lebih berkembang. Karenakan dengan mendapat jabatan politik itu aksesnya lebih mudah, izin usahanya juga begitu. tapi disitu memiliki dampak positif seperti bertambahnya lapangan kerja. Cuma harus punya skill ya kan. Dan disini pebisnis yang masuk ke politik dan memiliki jabatan harus mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Nah, artinya bahwa pebisnis ini jangan hanya bisa berbisnis, karena untuk memimpin itu dia harus paham tentang politik. kalau dia punya kemampuan dalam memimpin, sama sekali bukan masalah, apalagi jika SDM mampu ditingkatkan, nanti masyarakat bisa berkerja pada dia, sehingga sama-sama memiliki keuntungan (EL, wawancara 15 Juni 2019)”.

Oleh karena itu, masyarakat Nagan Raya setuju pebisnis masuk ke politik asal memenuhi persyaratan, diantaranya adalah kapasitas. Seorang pebisnis jika mempunyai kapasitas dalam memimpin, dia pantas jadi pemimpin tidak peduli apapun latar belakangnya. Kemudian kekuatan memimpin, yang artinya bahwa seorang pemimpin harus mampu dalam memerintah dan bukannya diperintah oleh orang lain, ia harus memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin juga harus bisa memberi arah kemana jalannya roda pemerintahan, jangan sampai jalannya tak tentu arah yang berimbas pada daerah yang mengalami kemunduran. Selanjutnya seorang pebisnis yang masuk ke ranah politik harus mengerti peta politik, bagaimana situasi atau keadaan politik sehingga dapat memutuskan

langkah apa yang harus diambil kedepannya. Alangkah bagusnya lagi apabila mereka memiliki pengalaman atau track record dalam politik, sehingga lebih mampu mengerti dan memahami tentang politik yang mendorong lajunya pertumbuhan daerah. Hal ini senada pernyataan masyarakat Nagan Raya yang berinisial SY.

“Untuk pengusaha yang terjun ke dunia politik tidak menjadi masalah selama mengerti dan memahami politik. ia punya skill dalam berpolitik. Kemudian yang paling penting adalah power kepemimpinan. Punya power dalam memimpin itu harus, karena kenapa? Kalau seseorang tidak memiliki power bagaimana dia memimpin. Dia tidak akan mampu. Seorang pemerintah tanpa kekuatan itu adalah hal yang buruk, karena tidak bisa membangun. Memerintah itu butuh kekuatan. Selain itu mampu membaca peta politik. jika tidak mampu melakukannya, mau dibawa kemana daerah yang dipimpin. Selanjutnya memiliki strategi dan pintar dalam menetapkan kebijakan. Pebisnis masuk ke politik tidak masalah, apa yang jadi masalah dalam mencari rezeki. Karena 9 dari 10 itu di berdagang atau berbisnis, kan masih ada satu lagi, ya bisa dengan masuk ke politik, baik menjadi bupati, wakil bupati maupun wakil rakyat. Mau memperbesar bisnisnya nanti, silahkan. Yang penting apa, masyarakat juga harus punya lapangan kerja dan ekonomi daerah meningkat (SY, wawancara 19 Juni 2019)”.

Masyarakat berharap, siapapun yang jadi pemimpin haruslah peduli terhadap masyarakat dan kesejahteraannya, mampu meningkat Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian daerah. Dengan begitu, daerah menjadi lebih maju. Apapun latar belakangnya, selama ia memenuhi syarat maka tidak masalah. Namun ada juga beberapa masyarakat Nagan Raya yang kurang berkenan jika pebisnis terjun ke dunia politik. Bagi mereka, pebisnis yang masuk dalam ranah politik tidaklah cocok, dikarenakan masuk ke politik tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ia harus paham tentang politik, paling tidak memiliki pengalaman dalam berpolitik. Mereka harus belajar dulu agar mampu

memimpin, karena membangun bisnis belum tentu mampu membangun daerah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat dengan inisial BT.

“Kalau pebisnis terjun ke dunia politik itu tidak nyambung, karena lain. Dunia politik paling tidak dia pernah jadi timses, itu paling kurang. Dan pernah ikut caleg, pernah jadi anggota partai politik. Kalau pebisnis terjun ke politik itu “Jauh Pangan daripada api”. Tapi dalam bisnis ada politiknya, politik dagang. Beda dengan politik seperti partai politik. Politik dagang misalnya begini, kamu ambil barang darimana? Dalam bisnis itu rahasia, tidak boleh dikatakan, itu saingan bisnis. Tidak bicara terus terang itu juga politik. Politik dagang seperti itu. Nah kalau politik praktik tu gimana? Politik ini bukan matematika, bukan imu pasti tapi ilmu tidak pasti. Bisa saja 1 ditambah 1 jadinya 6. Kalau dunia bisnis itu matematika. Jadi mereka harus belajar politik dulu (BT, wawancara 18 Juni 2019)”.

kemudian ada juga masyarakat yang mengharapkan bahwa sosok intelektual lah yang harus jadi pemimpin. Dimana mereka akan memperhatikan SDM yang mendorong masyarakat menjadi mandiri dan daerah menjadi lebih maju. Apabila pebisnis, mereka akan lebih memperhatikan aset-aset daerah sehingga masyarakat jadi terlupakan.

“Pandangan saya tentang pebisnis yang terjun ke politik lebih kepada visi misi mereka waktu mereka menjalankan politiknya. Karena sekarang kita lihat banyak pemimpin-pemimpin di negeri kita ini yang asal mulanya pebisnis. Rata-rata kita lihat. Jarang sekali kita temukan yang dari contohnya seperti Anis. Anis dia seorang dosen/akademisi yaitu seorang yang intelektual. Tapi coba kita bandingkan orang intelektual dan pebisnis yang terjun ke politik, ada tidak perbedaannya. Pasti ada. Perbedaannya saya sulit menjelaskan, susah dalam menyampaikan. Kalau pebisnis yang terjun ke politik dia itu lebih melihat kepada materi, kepada sumber daya alam. Namun kalau orang intelektual, dia bagaimana caranya supaya sumber daya manusia itu meningkat. Contoh sekarang kita lihat seperti Anis Baswedan, dia bagaimana pun caranya dia harus menemukan cara meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusianya. Kalau orang intelektual, contohnya Anis. Bagusnya malah dia mencalonkan diri jadi presiden. Kalau orang intelektual itu dia sangat memikirkan tentang peningkatan sumber daya manusia. Dia akan berusaha membimbing masyarakatnya supaya mandiri. Dia mencoba mengubah pola pikir masyarakat yang pertama tadi bermalas-malasan, dengan orang intelektual

ini dia akan mengubah pola pikir itu. Contohnya dengan memberikan dana-dana kepada masyarakat bawah untuk mengembangkan swadaya atau swasembada, jadi dengan cara-cara kecil seperti itu sehingga pola pikirnya meningkat. Kemudian dia memberikan fasilitas, itu bedanya sama orang intelektual. Mereka akan memberikan fasilitas dulu, bukan uang. Dengan memberikan fasilitas, punya sarana lengkap baru diolah. Tapi kalau pebisnis coba kita lihat sekarang, pebisnis memperlihatkan uang dulu, tidak diperlihatkan atau diberikan fasilitas dulu. Tidak diberikan fasilitas, kalau diberikan fasilitas rugi dia (AL, wawancara 18 Juni 2019)".

Namun begitu, rata-rata masyarakat Nagan Raya tidak masalah pebisnis terjun ke politik selama memiliki kualitas dan memahami tentang politik. selama mampu, latar belakang tidak menjadi persoalan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal yang paling utama adalah dapat memajukan daerah Nagan Raya dan mensejahterakan masyarakat.

#### **4.4.2. Tanggapan Masyarakat tentang Nagan Raya yang Dipimpin oleh Pebisnis**

Sekarang ini, Nagan Raya dipimpin oleh pasangan pebisnis yaitu Jamin Idham dan Chalidin Oesman setelah sekian lama dipegang oleh orang yang sama yaitu H.T. Zulkarnaini. Masyarakat Nagan Raya berharap dengan adanya perubahan pucuk pimpinan maka Nagan Raya juga akan berubah, tentunya kearah yang lebih baik. Namun saat ini masyarakat belum menemukan adanya perubahan selama pebisnis memegang kekuasaan, bahkan masyarakat menganggap Nagan Raya sekarang tidak jalan roda pemerintahannya.

"Saya lihat masalah pembangunan untuk sementara ini masih berjalan ditempat. Tidak jelas. Selama tiga tahun memimpin belum ada perubahan, Visi dan misinya belum terlaksanakan. Jika dulu kita mengharapkan perubahan dari pindahtangannya pucuk kepemimpinan, namun yang terjadi sekarang malah kemunduran, lebih dari dulu. Pokoknya belum ada kejelasan, kita belum merasakan kenikmatan dari pemimpin yang sekarang. Perekonomian juga tidak meningkat, harga sawit anjlok, padi

anjlok, buah pinang tidak ada harga lagi. Kami ingin perubahan, tapi untuk saat ini belum kita lihat perubahan. Pembangunannya juga begitu. Jangan seperti-seperti ini saja. Kita butuh kemajuan. Pendidikan perlu ditingkatkan. Dengan meningkatnya SDM maka daerah bisa lebih maju (HM, wawancara 15 Juni 2019)”.

• Masyarakat melihat bahwa Nagan Raya saat ini masih jalan ditempat, baik dari segi pembangunan, perekonomian, maupun pendidikan sebagai motor dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Hasil perekebunan yang dibeli dengan harga murah seperti sawit membuat ekonomi para petani jadi tidak stabil. Bukan hanya petani saja, kuli atau pekerja bangunan juga mengalami hal yang sama. Menurut pengakuan salah seorang masyarakat Nagan Raya berinisial BT yang juga seorang pekerja bangunan, ia mengatakan perekonomiannya menurun disebabkan belum, atau sedikitnya pekerjaan proyek yang ada. Kalau pekerja bangunan, jika tidak ada yang dibangun, mereka mau kerja apa. Maka secara otomatis perekonomiannya jadi menurun. Masyarakat juga menganggap bahwa praktik politik pemerintahan sekarang juga sama seperti sebelumnya, kinerja birokrasi juga tidak maksimal, padahal bupati saat ini pernah menjabat sebagai wakil bupati sebelumnya.

“Kalau kita lihat dalam konteks Nagan, memang kesan yang muncul ditengah-tengah masyarakat kapasitas pemimpin Nagan belum mumpuni, orang yang memimpin Nagan raya atau birokrasi lah. Beliau memiliki pengalaman sebagai wakil bupati, namun seperti nya beliau tidak memanfaatkan posisinya.sebagai wakil dulu untuk memahami lebih jauh tentang birokrasi dan politik itu sendiri. Kemudian dampak yang dirasakan secara politik belum ada perubahan, masih sama seperti sebelumnya praktik politiknya. Yang paling kentara itukan kita lihat dalam pemecatan kepala desa misalnya, keuchik itu polanya pola lama, masih semena-mena, sepihak tanpa melalui proses hukum. Itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan kita. Seorang keuchik itu harus jelas apa kesalahannya kemudian baru diproses, tidak juga serta-merta. Diproses secara hukum, kedudukan dia sudah jelas dimata hukum sebagai

tersangka, baru berhenti sementara. Ini kasuistik, sebagai perbandingan. Dahulu juga seperti itu, yang artinya tidak ada perubahan dalam konteks. Kemudian birokrasi juga, saya lihat kinerjanya juga payah (AY, wawancara 19 Juni 2019)".

Era perubahan yang begitu dinanti-nantikan oleh masyarakat hingga saat ini belum membawa perubahan. Sumber Daya Manusia (SDM) juga kurang diperhatikan. Seperti pernyataan AL, bahwa pebisnis yang memimpin Nagan Raya kurang memedulikan masalah peningkatan SDM, malah yang lebih diperhatikan adalah asset-aset mereka. Menurutnya, pebisnis yang terjun ke politik pasti ada pemikiran untuk mengembangkan asetnya, itu bersifat interes. Sedangkan masyarakat tidak ada pengembangan ekonominya, kecuali kelas atas atau seperti kontraktor yang memiliki modal.

Masyarakat mengatakan bahwa janji-janji saat kampanye masih banyak yang belum terealisasikan, seperti pengeluaran SK untuk guru honorer. Proses penyaluran dana juga lebih lambat dari sebelumnya, itu dibuktikan oleh pernyataan salah satu guru di yayasan nonformal yaitu belum dikeluarkannya SK untuk pengelola PAUD, kemudian lambatnya penyaluran uang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang menyebabkan mereka tidak tepat waktu menerima uang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) pertahun tersebut. Ini membuat masyarakat Nagan Raya kurang senang dengan pemerintahan saat ini.

Oleh karena itu, masyarakat Nagan Raya menganggap bahwa untuk saat ini pemimpin Nagan Raya belum dapat membawa perubahan pada daerah. Mereka kurang memiliki pengetahuan tentang berpolitik dan tidak punya kekuatan

(power) dalam memimpin. Seharusnya seorang pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan, namun untuk sekarang belum ditemukan pada pemimpin Nagan Raya. Mereka belum dapat membaca politik dan mengambil kebijakan dalam memajukan daerah. Masyarakat mengakui kesuksesan mereka dalam dunia bisnis, tapi tidak dalam dunia politik. karenanya, pebisnis yang sukses dalam bisnisnya belum tentu sukses dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut.

1. Salah satu motif pebisnis masuk ke jalur politik di Nagan Raya adalah mengekspansi bisnis melalui kekuasaan yang didapatkannya seperti membangun industri dan penggunaan Hak Guna Usaha (HGU).
2. Jabatan politik terbukti dapat memperbesar bisnis pribadi, hal ini diantaranya dibuktikan oleh Jamin Idham yang mampu mengembangkan bisnisnya dan mendapat keuntungan melalui penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit menurun, kemudian Chalidin Oesman yang dapat mendirikan industri rotan di Nagan Raya, sehingga bisnisnya berkembang yang otomatis dapat mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. Sedangkan Wan Malaya yang juga seorang pebisnis namun tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan, tidak dapat merealisasikan programnya yaitu membangun perusahaan sawit dalam skala yang jauh lebih besar dari sekarang. Hal itu dikarenakan tidak adanya respon dari pemerintah Nagan Raya. Oleh karena itu, dengan jabatan politik maka ia memiliki kekuasaan untuk mencapai tujuannya.
3. Tanggapan masyarakat Nagan Raya terhadap pengusaha yang terjun ke politik adalah tidak menjadi sebuah permasalahan bahkan jika mereka memiliki tujuan lain seperti memperluas bisnis mereka, selama mereka

memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memimpin dan mampu memajukan daerah Nagan Raya serta mensejahterakan masyarakat melalui meningkatnya perekonomian, itu tidak jadi masalah. Alangkah bagusnya lagi jika pebisnis memiliki track record dalam bidang politik sehingga lebih dalam lagi memahami tentang politik.

4. Masyarakat melihat bahwa Nagan Raya yang saat ini dipimpin oleh pebisnis masih jalan ditempat, belum ada perubahan. Mereka menganggap bahwa pemimpin saat ini belum mumpuni dan punya kekuatan dalam memimpin. Hal ini ditunjukkan dengan ekonomi yang menurun seperti anjloknya harga sawit. Kemudian dari segi pembangunan dan pendidikan juga belum ada perubahan yang terlihat. Masyarakat belum merasakan perubahan dari era perubahan tersebut. karenanya menurut mereka seorang pebisnis yang sukses dalam bisnisnya, belum tentu sukses dalam membangun daerah

## **5.2. Saran**

Penulis berharap Pemerintah Nagan Raya lebih mengutamakan dan fokus pada kemajuan daerah terutama pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan hanya pribadi dan segelintir orang saja. Kemudian alangkah baiknya apabila seorang pebisnis yang berkarir dalam politik memiliki kapasitas pengetahuan tentang politik sehingga mampu memahami tentang politik dan cara menjalankan roda pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hoogerwerf. 1979. *Politicologie terj.* Jakarta: Erlangga.
- Amiriddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Sujanto. 2004. *Psikologi Umum.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Amirullah. 2005. *Pengantar Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burhan Ashofa. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Foucault, Michael. 1978. *The History of Sexuality: An Introduction.* Ed. 1. New York: Pantheon Books.
- George Ritzer & Douglad J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Kencana.
- Griffin dan Ebert. 2007. *Bisnis.* Jakarta : Erlangga.
- H. Rachmat dan Dadang Gunawan. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hamid Patilima. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: ALFABETA.
- Hotman Siahaan. 1986. *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi.* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Imam Hidayat. 2009. *Teori-Teori Politik.* Malang: SETARA Press.
- Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern.* Bandung : PT Refika Aditama
- Jeffrey A. Winters. 2011. *Oligarkhi Terj.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini Kartono. 1996. *Pendidikan Politik.* Bandung : Mandar Maju.

Kasmir dan Jakfar. 2012. *Studi Kelayakan Bisnis*, Ed. Revisi. Jakarta : Prenada Media.

Lexy J. Moloeng. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhtar Haboddin. 2017. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: UB Press.

Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

M. Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.

Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Seta Basri. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.

Winarno Surakhmad. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

### **Jurnal dan Skripsi**

Abdil Mughis Mudhoffir 2013. *Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi Masyarakat. 18(1).

Atika Nur Kusumaningtyas, dkk. 2017. *Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal*. Jurnal Penelitian Politik. 14(2): 243-264.

D. D. Ananda. 2017. *Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014*. Jurnal Politik. 2(5): 101-135.

Dodi Suprihanto. 2011. *Pengusaha dan Politik : Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik Di Sumatera Barat 1999-2009*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

Herning Suryo. 2014. *Konspirasi Bisnis (Pengusaha) Dalam Politik Praktis*. Jurnal Transformasi. 1(26): 1-51.

JR Situmorang 2009. *Beberapa Keterkaitan antara Politik dan Bisnis*. Jurnal Administrasi Bisnis. 5(2): 146-159.

Novita Gustian Ningsih. 2018. *Afiliasi Politik Suku Jawa Dalam Pilkada Nagan Raya 2017*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Ray Daniel M. 2016. *Bisnis dan Politik Studi Kepentingan : Pengusaha Lokal dalam Pemenangan Calon Bupati Johnny Sitohang Dairi 2014-2019*. Jurnal Sosiologi Masyarakat. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Rizki Pandu. 2016. *Buruh dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Buruh perempuan di PT. Ujong Neubok Dalam Kabupaten Nagan Raya)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

### Media Online

Aceh Terkini, *Jamin Idham, Calon Kepala Daerah Terkaya di Aceh, Baca Daftar Lengkapnya*. 16 November 2016 dalam <https://www.acehterkini.com/2016/11/jamin-idham-calon-kepala-daerah-terkaya-baca-daftar-lengkapnya.html>. Diakses 26 Juni 2019.

Media Aceh, *Ini Calon Wakil Bupati Terkaya di Aceh*, 8 Oktober 2016, dalam <http://mediaaceh.co/2016/10/ini-calon-wakil-bupati-terkaya-di-aceh/>, Diakses 26 Juni 2019..

Zainun Yusuf, *Harga TBS Sawit di Nagan Ditetapkan Sepihak, Petani di Abdya Minta Pembelaan Pemerintah*, 18 Juni 2019, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/06/18/harga-tbs-sawit-di-nagan-ditetapkan-sepihak-petani-di-abdya-minta-pembelaan-pemerintah>, Diakses 1 Juli 2019.

### Website

Nagan Raya dalam Angka 2017 dalam <https://naganrayakab.bps.go.id/>. Diakses 25 Maret 2019.

*Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Nagan Raya 2012-2017* dalam [naganrayakab.go.id/](https://naganrayakab.go.id/). Diakses 26 Juni 2019.

Top Lintas, *Pengertian bisnis* dalam <https://m.toplintas.com>. diakses pada 4 Agustus 2019

**Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara Dengan Pebisnis yang Berkarir dalam Politik**



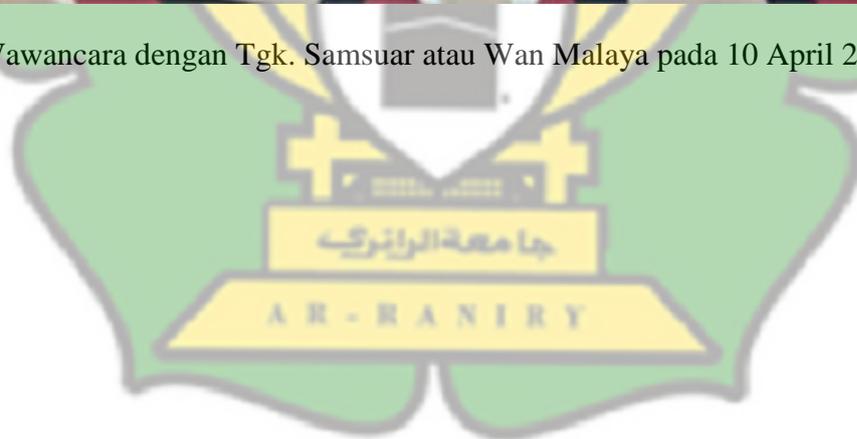
(Wawancara dengan Puji Hartini pada 09 April 2019)



(Wawancara dengan Chalidin Oesman pada 10 April 2019)



(Wawancara dengan Tgk. Samsuar atau Wan Malaya pada 10 April 2019)



**Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat Nagan Raya  
Pada 14-19 Juni 2019**



**Lampiran 3: Hasil Rapat Penetapan dan Pemantauan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Wilayah Barat Untuk Periode Mei dan Juli 2019**

**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**  
 Jln. T. P. Nyak Makam No. 24, Telp. +62651-7552041; Fax +62651-7555324  
 BANDA ACEH 23125

**HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PEMANTAUAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT WILAYAH BARAT UNTUK PERIODE MEI 2019**

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019 bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jln. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh), mengenai harga TBS dan Indeks "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Perumahan Kelapa Sawit di Aceh yaitu:

1. Rata-rata Harga CPO : Rp. 6.708,82
- Rata-rata harga Kernel : Rp. 3.942,42
2. Indeks "K" adalah : 78,43%

Maka dengan ini peroleh harga TBS Kelapa Sawit Prov. Aceh sebagai berikut:

No	Umur Tanaman	Indeks K	R CPO	Harga CPO (Rp)	A = (4 x 5)	R-15	Harga (5) (Rp)	B (7 x 8)	Harga TBS = 3x(6+9) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3 Tahun	78,43%	14,49%	6.708,82	972,11	3,78%	3.942,42	149,02	879,30
2.	4 Tahun	78,43%	17,06%	6.708,82	1.144,53	4,52%	3.942,42	178,20	1.037,43
3.	5 Tahun	78,43%	18,41%	6.708,82	1.235,09	4,64%	3.942,42	182,93	1.112,15
4.	6 Tahun	78,43%	19,41%	6.708,82	1.302,17	4,87%	3.942,42	192,00	1.171,88
5.	7 Tahun	78,43%	20,71%	6.708,82	1.355,85	4,94%	3.942,42	194,76	1.216,14
6.	8 Tahun	78,43%	20,54%	6.708,82	1.377,99	4,96%	3.942,42	195,54	1.234,12
7.	9 Tahun	78,43%	20,74%	6.708,82	1.391,43	5,03%	3.942,42	198,30	1.246,11
8.	10 - 20 Tahun	78,43%	21,80%	6.708,82	1.428,98	5,15%	3.942,42	203,03	1.279,99
9.	21 Tahun	78,43%	20,81%	6.708,82	1.397,45	5,06%	3.942,42	199,49	1.252,48
10.	22 Tahun	78,43%	20,53%	6.708,82	1.377,32	5,00%	3.942,42	197,12	1.234,83
11.	23 Tahun	78,43%	20,40%	6.708,82	1.368,60	5,00%	3.942,42	197,12	1.227,99
12.	24 Tahun	78,43%	20,14%	6.708,82	1.344,16	4,97%	3.942,42	195,94	1.213,19
13.	25 Tahun	78,43%	19,76%	6.708,82	1.327,01	4,96%	3.942,42	195,54	1.194,14

Harga TBS diatas berlaku untuk Minggu II bulan Mei 2019 s/d Minggu I bulan Juni 2019

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 03 Mei 2019

**KEBENGTAHU**  
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

**KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN**

**Dr. CUT HUZAINAH, NIP.**  
 PEMBINA TK.1  
 NIP.19060217 199203 2 003  
 ND No. 875.1/738/1.1 Tanggal 30 April 2019

**W. Nurfarida, MT**  
 PEMBINA  
 NIP.19660724 199303 2 003  
 ND. No.08/ND/V/2019 Tanggal 30 April 2019



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24, Telp. +62651-7552041; Fax +62651-7555324  
BANDA ACEH 23125

**HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PEMANTAUAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT**  
**WILAYAH BARAT UNTUK PERIODE JULI 2019**

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2019 bertempat di Aula Unit II Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jln. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) No. 04 Banda Aceh, mengenai harga TBS dan Indeks "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Perusahaan Kelapa Sawit di Aceh yaitu :

1. Rata-rata Harga CPO : Rp. 6.347,10  
Rata-rata harga Kernel : Rp. 3.651,78
2. Indeks "K" adalah : 78,32%

Maka dengan ini peroleh harga TBS Kelapa Sawit Prov. Aceh sebagai berikut:

No	Umur Tanaman	Indeks K	R-CPO	Harga CPO (Rp)	A = (4 x 5)	R-15	Harga 15 (Rp)	B (7 x 8)	Harga TBS = 3 x (6+9) (Rp)	Dibulatkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	3 Tahun	78,32%	14,49%	6.347,10	919,69	3,78%	3.651,78	138,04	828,42	828
2.	4 Tahun	78,32%	17,06%	6.347,10	1.082,82	4,52%	3.651,78	165,06	977,34	977
3.	5 Tahun	78,32%	18,41%	6.347,10	1.168,50	4,64%	3.651,78	169,44	1.047,88	1.048
4.	6 Tahun	78,32%	19,41%	6.347,10	1.231,97	4,87%	3.651,78	177,84	1.104,17	1.104
5.	7 Tahun	78,32%	20,21%	6.347,10	1.282,75	4,94%	3.651,78	180,40	1.145,94	1.146
6.	8 Tahun	78,32%	20,54%	6.347,10	1.303,69	4,96%	3.651,78	181,13	1.162,91	1.163
7.	9 Tahun	78,32%	20,74%	6.347,10	1.316,39	5,03%	3.651,78	183,68	1.174,86	1.175
8.	10 - 20 Tahun	78,32%	21,30%	6.347,10	1.351,93	5,15%	3.651,78	188,07	1.206,13	1.206
9.	21 Tahun	78,32%	20,83%	6.347,10	1.322,10	5,06%	3.651,78	184,78	1.180,19	1.180
10.	22 Tahun	78,32%	20,53%	6.347,10	1.303,06	5,00%	3.651,78	182,59	1.163,56	1.164
11.	23 Tahun	78,32%	20,40%	6.347,10	1.294,81	5,00%	3.651,78	182,59	1.157,10	1.157
12.	24 Tahun	78,32%	20,14%	6.347,10	1.278,31	4,97%	3.651,78	181,49	1.143,31	1.143
13.	25 Tahun	78,32%	19,78%	6.347,10	1.255,46	4,96%	3.651,78	181,13	1.125,13	1.125

Harga TBS diatas berlaku untuk Minggu II Bulan Juli 2019 s/d Minggu I Bulan Agustus 2019.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Banda Aceh, 11 Juli 2019

KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN

FAKHRURRAZI, SP, M.Sc  
PEMBINA

NIP.19700802 200112 1 002  
ND No. 875.1/984/I.1 Tanggal 04 Juli 2019

I. NURLAILA, MT  
PEMBINA

NIP.19660724 199303 2 003  
ND.No.14/ND/V/2019 Tanggal 8 Juli 2019

**Lampiran 4: Tanggapan Masyarakat Terhadap Pebisnis yang Terjun Ke Politik**

No	Nama	Tanggapan
1	AY	<p>Memang yang harus dipahami bahwa politik Indonesia itu politik berbiaya tinggi. Jadi ada kesan disementara masyarakat bahwa seseorang yang terjun ke politik itu harus memiliki cukup biaya. Karena sistem kita memang membutuhkan biaya yang begitu tinggi dalam kontestasi politik. Apakah kemudian membayar kampanyenya dan lain-lain yang diperlukan. Dan terkait dengan cocok tidaknya itu tergantung kapasitas. Kalau kapasitas dia mumpuni untuk memimpin saya rasa tidak masalah latar belakang apapun untuk menjadi seorang pemimpin. Namun idealnya memang menjadi pemimpin itu punya track record di bidang politik, apakah dia pernah menjabat sebagai legislatif, kemudian indibirokrasi itu lebih cocok (Wawancara 19 Juni 2019).</p>
2	AL	<p>Pandangan saya tentang pebisnis yang terjun ke politik lebih kepada visi misi mereka waktu mereka menjalankan politiknya. Karena sekarang kita lihat banyak pemimpin-pemimpin di negeri kita ini yang asal mulanya pebisnis. Rata-rata kita lihat. Jarang sekali kita temukan yang dari contohnya seperti Anis. Anis dia seorang dosen/akademisi yaitu seorang yang intelektual. Tapi coba kita bandingkan orang intelektual dan pebisnis yang terjun ke politik, ada tidak perbedaannya. Pasti ada. Perbedaannya saya sulit menjelaskan, susah dalam menyampaikan. Kalau pebisnis yang terjun ke politik dia itu lebih melihat kepada materi, kepada sumber daya alam. Namun kalau orang intelektual, dia bagaimana caranya supaya sumber daya manusia itu meningkat. Contoh sekarang kita lihat seperti Anis Baswedan, dia bagaimana pun caranya dia harus menemukan cara meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusianya. Kalau orang intelektual, contohnya Anis. Bagusnyalah dia mencalonkan diri jadi presiden. Kalau orang intelektual itu dia sangat memikirkan tentang peningkatan sumber daya manusia. Dia akan berusaha membimbing masyarakatnya supaya mandiri. Dia mencoba mengubah pola pikir masyarakat yang pertama tadi bermalas-malasan, dengan orang intelektual ini dia akan mengubah pola pikir itu. Contohnya dengan memberikan dana-dana kepada masyarakat bawah untuk mengembangkan swadaya atau swasembada, jadi dengan cara-cara kecil seperti itu</p>

		sehingga pola pikirnya meningkat. Kemudian dia memberikan fasilitas, itu bedanya sama orang intelektual. Mereka akan memberikan fasilitas dulu, bukan uang. Dengan memberikan fasilitas, punya sarana lengkap baru diolah. Tapi kalau pebisnis coba kita lihat sekarang, pebisnis memperlihatkan uang dulu, tidak diperlihatkan atau diberikan fasilitas dulu. Tidak diberikan fasilitas, kalau diberikan fasilitas rugi dia (Wawancara 18 Juni 2019).
3	BT	Kalau pebisnis terjun ke dunia politik itu tidak nyambung, karena lain. Dunia politik paling tidak dia pernah jadi timses, itu paling kurang. Dan pernah ikut caleg, pernah jadi anggota partai politik. Kalau pebisnis terjun ke politik itu “Jauh Pangan daripada api”. Tapi dalam bisnis ada politiknya, politik dagang. Beda dengan politik seperti partai politik. Politik dagang misalnya begini, kamu ambil barang darimana? Dalam bisnis itu rahasia, tidak boleh dikatakan, itu saingan bisnis. Tidak bicara terus terang itu juga politik. Politik dagang seperti itu. Nah kalau politik praktik itu gimana? Politik ini bukan matematika, bukan ilmu pasti tapi ilmu tidak pasti. Bisa saja 1 ditambah 1 jadinya 6. Kalau dunia bisnis itu matematika. Jadi mereka harus belajar politik dulu (Wawancara 18 Juni 2019).
4	NA	Kalau pebisnis terjun ke politik itu memang banyak di Indonesia. Cuma itu tidak masalah selama mampu membangun Nagan Raya menjadi lebih maju dan mensejahterakan masyarakat. Jika mereka peduli kepada masyarakat itu tidak masalah, karena pebisnis itu sudah kaya, dan dengan terjun ke politik dia menjadi semakin kaya. Dan hal tersebut tidak masalah, memperkaya diri sama sekali bukan masalah selama masyarakatnya juga sejahtera. Namun jika masyarakat terancam garis kemiskinan dibawah rata-rata maka hal itu sangat lah buruk (Wawancara 14 Juni 2019).
5	SW	Menurut saya jika pebisnis terjun ke politik itu cocok, karena mereka sudah terbiasa tentang masalah atau mengurus ekonomi. Pokoknya kalau masalah ekonomi orang itu lebih berpengalaman. Jadi saya setuju jika pebisnis terjun ke politik asalkan memiliki kualitas dan pemahaman tentang politik sehingga bisa menjalankan pemerintahan (Wawancara 14 Juni 2019).
6	RW	saya pribadi suka jika pebisnis terjun ke politik. karena pebisnis ini bisa membagi pengalamannya ke masyarakat. Kita bisa jadikan dia sebagai pelajaran. Maksudnya adalah bahwa kita bisa belajar cara untuk

		<p>sukses dengan melihat mereka. Jadi sukses itu bukan hanya dengan jadi PNS. Buka usaha sendiri itu malah jauh lebih sukses. Jadi saya tidak masalah jika pebisnis masuk ke politik, apalagi mereka mengerti tentang masalah ekonomi. Jadi selama mampu membangun daerah tidak masalah. Saya sendiri lebih suka pebisnis dari pada birokrat. Menurut saya karena jika pebisnis itu dia telah memiliki kekayaan yang banyak bahkan sebelum terjun ke politik. Jadi mungkin tindakan korupsi dapat diminimalisir. Walaupun nanti dia memiliki niat untuk memperluas bisnisnya itu tidak apa-apa bagi saya, selama mereka peduli dengan masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah. Jadi disamping memperkaya diri, juga memperkaya daerah (Wawancara 14 Juni 2019).</p>
7	HM	<p>Saya setuju. Tidak peduli apa latar belakangnya selama ia dapat memajukan daerah saya setuju. Jika pebisnis itu bisa memimpin, tidak masalah. Terserah nanti ada prasangka yang muncul tentang mereka yang memperluas bisnis misalnya, itu tidak masalah untuk saja. Karena rata-rata memang seperti itu adanya. Jika peduli terhadap masyarakat saya pribadi tidak memperlakukan hal itu (Wawancara 15 Juni 2019).</p>
8	SM	<p>Siapapun saya setuju jadi pemimpin dengan syarat dapat membangun Nagan Raya. Kalau dia pebisnis tapi mampu memimpin, ya silahkan. Siapapun pokoknya. Kalau memang dibidang pebisnis ini terjun ke politik agar dia berkuasa, dan nanti bisa memajukan bisnisnya. Itu tidak masalah. Siapapun juga akan seperti itu. Jika bukan dari pebisnis, dia juga akan mencari kekayaan melalui jabatannya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah orang yang dapat memajukan daerah (Wawancara 15 Juni 2019).</p>
9	SY	<p>Untuk pengusaha yang terjun ke dunia politik tidak menjadi masalah selama mengerti dan memahami politik. Ia punya skill dalam berpolitik. Kemudian yang paling penting adalah power kepemimpinan. Punya power dalam memimpin itu harus, karena kenapa? Kalau seseorang tidak memiliki power bagaimana dia memimpin. Dia tidak akan mampu. Seorang pemerintah tanpa kekuatan itu adalah hal yang buruk, karena tidak bisa membangun. Memerintah itu butuh kekuatan. Selain itu mampu membaca peta politik. jika tidak mampu melakukannya, mau dibawa kemana daerah yang dipimpin. Selanjutnya memiliki strategi dan pintar dalam menetapkan kebijakan. Pebisnis masuk ke politik</p>

		<p>tidak masalah, apa yang jadi masalah dalam mencari rezeki. Karena 9 dari 10 itu di berdagang atau berbisnis, kan masih ada satu lagi, ya bisa dengan masuk ke politik, baik menjadi bupati, wakil bupati maupun wakil rakyat. Mau memperbesar bisnisnya nanti, silahkan. Yang penting apa, masyarakat juga harus punya lapangan kerja dan ekonomi daerah meningkat (Wawancara 19 Juni 2019)</p>
10	EL	<p>Bagi saya, jika pebisnis terjun ke politik itu biasanya selain ingin menjabat dia juga ingin bisnisnya agar lebih berkembang. Karenakan dengan mendapat jabatan politik itu aksesnya lebih mudah, izin usahanya juga begitu. tapi disitu memiliki dampak positif seperti bertambahnya lapangan kerja. Cuma harus punya skill ya kan. Dan disini pebisnis yang masuk ke politik dan memiliki jabatan harus mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Nah, artinya bahwa pebisnis ini jangan hanya bisa berbisnis, karena untuk memimpin itu dia harus paham tentang politik. kalau dia punya kemampuan dalam memimpin, sama sekali bukan masalah, apalagi jika SDM mampu ditingkatkan, nanti masyarakat bisa berkerja pada dia, sehingga sama-sama memiliki keuntungan (Wawancara 15 Juni 2019)</p>



**Lampiran 5: Tanggapan Masyarakat tentang Nagan Raya yang Dipimpin Oleh Pebisnis**

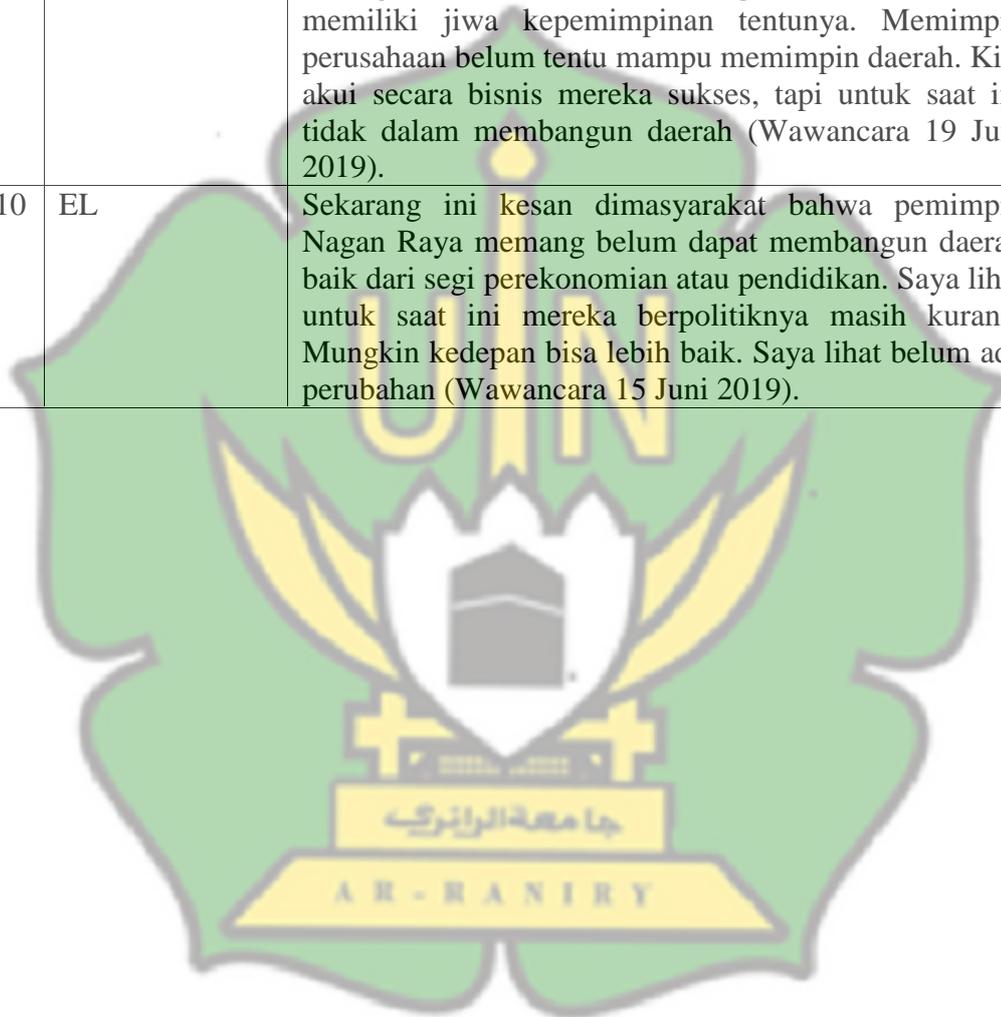
No	Nama	Tanggapan
1	AY	<p>Kalau kita lihat dalam konteks Nagan, memang kesan yang muncul ditengah-tengah masyarakat kapasitas pemimpin Nagan belum mumpuni, orang yang memimpin Nagan raya atau birokrasi lah. Beliau memiliki pengalaman sebagai wakil bupati, namun seperti nya beliau tidak memanfaatkan posisinya sebagai wakil dulu untuk memahami lebih jauh tentang birokrasi dan politik itu sendiri. Kemudian dampak yang dirasakan secara politik belum ada perubahan, masih sama seperti sebelumnya praktik politiknya. Yang paling kentara itukan kita lihat dalam pemecatan kepala desa misalnya, keuchik itu polanya pola lama, masih semena-mena, sepihak tanpa melalui proses hukum. Itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan kita. Seorang keuchik itu harus jelas apa kesalahannya kemudian baru diproses, tidak juga serta-merta. Diproses secara hukum, kedudukan dia sudah jelas dimata hukum sebagai tersangka, baru berhenti sementara. Ini kasuistik, sebagai perbandingan. Dahulu juga seperti itu, yng artinya tidak ada perubahan dalam konteks. Kemudian birokrasi juga, saya lihat kinerjanya juga payah (Wawancara 19 Juni 2019).</p>
2	AL	<p>Kita sekarang di Nagan Raya, yang jadi Bupati orang pebisnis sawit ataupun pebisnis dibidang apa-apalah. Tapi coba kita lihat, adakah peningkatan sumber daya manusia ada diperhatikan? Kurang diperhatikan. Mereka lebih ke aset-aset daerah. Kalau Bupati misalnya juga memikirkan kebun sawitnya, memperluas atau apa. Misalnya Chalidin, setelah dia jadi Wakil Bupati dia berangkat kesana (Jakarta), diakan juga perlu memikirkan aset nya supaya tidak jatuh. Kadang-kadang kalau buruk pemikiran kita tentang pebisnis yang terjun ke politik, niatnya bukan untuk kesejahteraan masyarakat tapi untuk mensejahterakan aset dirinya sendiri. Itu bahasa kasar kita bilang. Misalnya kalau saya jadi Bupati nanti saya kembangkan blablabla. Itu pasti ada pemikirannya, interen itu. Pasti ada. Cuma eksetern memperlihatkan hebat sama orang. Misalnya kita kasih contoh di Nagan, kalau dikritik nanti dibilang kita suka kritik-kritik pemimpin. Sebenarnya bukan, kita kan melihat dari atau secara</p>

		<p>sudut pandang ilmu pengetahuan kita. Dampak perubahan juga tidak ada. Kalau tidak bekerja keras sendiri, tidak ada. Zaman sekarang, pilih siapa saja kalau tidak usaha sendiri tidak. Perekonomian biasa saja, tidak ada peningkatan. Mungkin bisnis mereka saja yang meningkat. Cuma ada yang meningkat, ya kalangan atas. Kalau mereka bisa merasakan peningkatan, karena mereka banyak keuntungan. Kalau kita? Sekarang coba kita tanyakan sama masyarakat bawah, ada peningkatan? Tidak. Kalau orang atas kenapa mereka meningkat? Karena mereka mengeluarkan modal besar. Contoh kontraktor, kalau tidak dikeluarkan modal besar, dapat proyek dari siapa? Dari pemerintah. Mereka harus keluarkan modal besar dulu, jadi ketika mereka beruntung otomatis mereka akan meningkat. Kalau kita, mana ada modal. Untuk nasi satu suap aja harus bolak-balik. Itu singkatnya, kasarnya begitu. Kalau di Nagan, siapa yang dekat dengan ketiak, itu yang dapat wanginya. Bahkan dalam kampung pun begitu. Ini juga kan baru selesai pemilu. Kita lihat nanti bagaimana DPRK, Puji Hartini kan juga dari pebisnis. Nanti kita lihat, semoga ada perubahan (Wawancara 18 Juni 2019).</p>
3	BT	<p>Mereka itu belajar dulu dari politik. karena pebisnis ini tidak segampang kita balik telapak tangan langsung bisa ke politik. Dia harus belajar dulu satu dua tahun. Tahun satu dan kedua, mungkin masih jajakan. Tahun ketiga, keempat dan kelima, udah mantap lah sedikit. Ini boleh dibilang boleh tidak. Nagan Raya saat ini agak jalan ditempat sedikit. Kurang bagus. Mungkin tahun depan sudah lebih baik karena dia udah bisa berkembang dalam berpolitik dan pembangunan Nagan Raya. Kalau dulu saya lihat banyak proyek. Namun sekarang belum atau mungkin sedikit, atau memang sudah ada pembangunan dan tidak perlu dibangun lagi. Untuk perekonomian saya rasa menurun, karena kita kan buka hanya pegawai saja, petani ada dan pekerja bangunan juga. Kalau pekerja bangunan, jika tidak ada yang dibangun, mau kerja apa. Secara otomatis perekonomiannya agak menurun (Wawancara 18 Juni 2019).</p>
4	SW	<p>Untuk sekarang Nagan Raya amburadul, sangat amburadul. misalnya tentang janji-janji. Janji-janji yang diucapkan kepada guru honorer, tidak ada kepastian dan tidak ditepati-ditepati janjinya. Contoh janji pengelola PAUD dikeluarkan SK, ternyata tidak ada.</p>

		<p>kemudian tentang misalnya proses uang BOP untuk tenaga guru yang berkecimpung di yayasan. Pokoknya apa yang dijanjikan tidak sama dengan politik yang kemarin-kemarin. Tidak terealisasikan janjinya. Untuk saat ini sangat buruk. Contohnya tentang perubahan. Namun sekarang belum ada perubahan sama sekali. Menurut yang saya lihat pemimpinya belum pandai dalam berpolitik. Kemudian juga kami kemarin itu punya uang BOP 5 juta pertahun. Itu uang APBK. Sebenarnya uang APBK itu keluar tiap tahun disalurkan untuk seluruh yayasan yang nonformal. Jadi sebelumnya itu uangnya disalurkan langsung ke pengelola-pengelola PAUD. Dan yang terjadi sekarang prosesnya lambat, uangnya sudah keluar dari Dinas Pendidikan namun agak terhambat. Agak lambat dari sebelumnya. dan sekarang juga ada pebisnis yang mencalonkan diri jadi DPRK, dan diantara mereka ada yang menang. Semoga para pebisnis ini dapat memajukan perekonomian Nagan Raya. Karena pebisnis itu cocok dalam mengembangkan perekonomian. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan ada perubahan dan lebih maju (Wawancara 14 Juni 2019).</p>
5	NA	<p>Untuk sekarang saya lihat masih biasa-biasa saja. Kurang sejahtera. Dan untuk pembangunan juga masih biasa-biasa saja. Tidak ada yang bikin “wow”. Dan kalau masalah pembangunan, bagusnya dibangun jalan dulu karena bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daripada membangun gedung-gedung. Jalan dikampung kami sekarang masih belum dibangun, belum ada aspal. Kemudian kalau bangun perusahaan, yang bisa masuk ke perusahaan itu siapa? Pasti orang yang punya pendidikan, gelar sarjana, sedangkan masyarakat yang tamatan SD SMP SMA apa yang bisa mereka rasakan, kan tidak ada. Lebih baik bangun jalan yang merata saja dulu. Untuk saat ini saya belum merasakan dampak apa-apa dari era perubahan ini (Wawancara 14 Juni 2019).</p>
6	RW	<p>Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saya sangat suka dengan pebisnis, karena mereka bisa membuat kita termotivasi. Seperti Jamin Idham, dia memiliki pabrik sawit sehingga dia menjadi orang yang kaya. Dengan kekayaannya dia bisa mencalonkan diri atau naik menjadi apa saja akan lebih mudah. Karena ia memiliki modal. Namun kekurangannya saya melihat bahwa belum ada perubahan yang begitu terlihat selama</p>

		<p>mereka memimpin. Dia adalah seorang pebisnis sukses, namun daerah yang dia pimpin masih terlampaui biasa saja. Mungkin dari segi politiknya masih kurang bagus. Kita lihat kedepan mungkin saja ada perubahan. Kemudian kalau dilihat dampak secara pribadi itu bisa dikatakan kurangnya kepedulian, karena kita bukan orang yang dekat dengannya. Tapi dari sisi lain ada lah bantuan, seperti santunan kematian, kemudian pembangunan jalan juga ada. Cuma kalau dilihat secara menyeluruh dampaknya biasa-biasa saja. Saya masih seperti biasa tidak ada yang berubah (Wawancara 14 Juni 2019).</p>
7	HM	<p>Saya lihat masalah pembangunan untuk sementara ini masih berjalan ditempat. Tidak jelas. Selama tiga tahun memimpin belum ada perubahan. Visi dan misinya belum terlaksanakan. Jika dulu kita mengharapkan perubahan dari pindahtangannya pucuk kepemimpinan, namun yang terjadi sekarang malah kemunduran, lebih dari dulu. Pokoknya belum ada kejelasan, kita belum merasakan kenikmatan dari pemimpin yang sekarang. Perekonomian juga tidak meningkat, harga sawit anjlok, padi anjlok, buah pinang tidak ada harga lagi. Kami ingin perubahan, tapi untuk saat ini belum kita lihat perubahan. Pembangunannya juga begitu. Jangan seperti-seperti ini saja. Kita butuh kemajuan. Pendidikan perlu ditingkatkan. Dengan meningkatnya SDM maka daerah bisa lebih maju (Wawancara 15 Juni 2019).</p>
8	SM	<p>saya lihat sekarang ini roda pemeritahan Nagan Raya belum ada perubahan. Masih jalan ditempat. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang belum ada, kemudian ekonomi yang menurun contohnya harga sawit yang anjlok tapi barang agak mahal. Kemudian lapangan kerja juga kurang. Kita lihat banyak lulusan atau sarjana. Tapi jarang dipakai, maksudnya pakailah orang yang punya skill agar daerah lebih maju. Jangan yang ditarik hanya orang-orang nya saja atau pendukungnya. Intinya selama pemerintahan ini belum ada perubahan yang kita lihat, laju ditempat. Tapi mungkin saja kedepan bisa berkembang lebih baik lagi (Wawancara 15 Juni 2019).</p>
9	SY	<p>Di Nagan Raya saya lihat belum ada peningkatan sama sekali. Baik dari segi pembangunan maupun perekonomian. Menurut saya pemimpin di Nagan Raya belum punya power kepemimpinan dan kapasitasnya belum ada. Ini bisa kita lihat dari segi ekonomi yang menurun, seperti anjloknya harga sawit, pokoknya</p>

		<p>masih ditempat yang sama, tidak berjalan, malah bisa dikatakan menurun. Tidak ada langkah-langkah yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan, tidak ada perubahan yang kita lihat. Padahal sebelumnya kita memilih mereka agar adanya perubahan. Saya lihat mereka belum bisa dalam berpolitik. Politik itu perlu kecerdasan dan intelektual sehingga mampu memajukan daerah dan meningkatkan SDM, serta memiliki jiwa kepemimpinan tentunya. Memimpin perusahaan belum tentu mampu memimpin daerah. Kita akui secara bisnis mereka sukses, tapi untuk saat ini tidak dalam membangun daerah (Wawancara 19 Juni 2019).</p>
10	EL	<p>Sekarang ini kesan dimasyarakat bahwa pemimpin Nagan Raya memang belum dapat membangun daerah baik dari segi perekonomian atau pendidikan. Saya lihat untuk saat ini mereka berpolitiknya masih kurang. Mungkin kedepan bisa lebih baik. Saya lihat belum ada perubahan (Wawancara 15 Juni 2019).</p>



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama : Diana Faudhiah
- Tempat/Tgl Lahir : Lhok Pange, 27 April 1997
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Meunasah Baktrieng kec Lambarona Jaya Kota Banda  
Aceh, Aceh
- Asal : Nagan Raya
- Status : Mahasiswi
- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
- Agama : Islam
- Tinggi : 146cm
- Berat Badan : 41 Kg
- Golongan Darah : B
- No Hp/Email : 082366937122 / dianappbustanuljannah@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

- 2003-2009 : MIN Keude Neulop, Nagan Raya
- 2009-2012 : MTsN Jeuram, Nagan Raya
- 2012-2015 : MAN Nagan Raya
- 2015-Sekarang : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Pengalaman Organisasi

- Anggota Osim MTsn Jeuram (2010-2011)
- Sekretaris Osim MAN Nagan Raya (2012-2013)
- Wakil Ketua Osim MAN Nagan Raya (2013-2014)
- Bendahara Komunitas ROHIS MAN Nagan Raya (2014)
- Anggota HMJ Ilmu Politik UIN Ar-Raniry (2016-2017)
- Anggota Dewan Mahasiswa FISIP UIN Ar- Raniry(2018-2019)